

**PENGEMBANGAN *PARTY-IDENTIFICATION* DAN TANTANGANNYA
DI ERA REFORMASI**

Studi Kasus di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Hibatullah Hauzan Hanif

1706016040

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

Lembar Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Hibatullah Hauzan Hanif

NIM : 1706016040

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : "Pengembangan *Party-Identification* dan Tantangannya di Era Reformasi : Studi Kasus di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal "

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan dalam ujian munaqosah.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

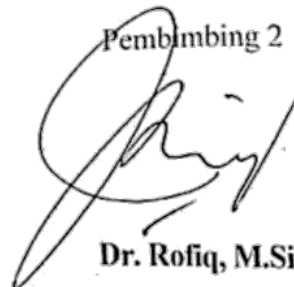
Pembimbing,

Pembimbing 1



Dr. H. M. Parmudi, M.Si

Pembimbing 2



Dr. Rofiq, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGEMBANGAN *PARTY-IDENTIFICATION* DAN TANTANGANNYA DI ERA REFORMASI : STUDI KASUS DI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TEGAL

Disusun Oleh:

Hibatullah Hauzan Hanif

1706016040

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi

Pada tanggal 20 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji

Ketua

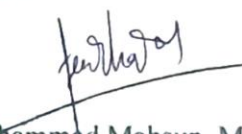


Dr. Rofiq, M.Si
NIP. 19730305 201601 1 901



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 19680505 199503 1 002

Penguji II



Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 19851118 201601 1 901

Pembimbing I



Dr. H. M. Parmudi
NIP. 19690425 200003 1 001

Pembimbing II




Dr. Rofiq, M. Si
NIP. 19730305 201601 1 901

LEMBAR PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Desember 2022



Hibatullah Hauzan Hanif

1706016040

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas karunianya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengembangan *Party-Identification* dan Tantangannya di Era Reformasi”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Setelah berbagai usaha dilakukan, pada akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan walaupun masih terdapat kekurangan. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dra. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang,
2. Dr. H. M. Parmudi selaku Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis,
3. Dr. Rofiq, M.Si selaku Dosen pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis,
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. DPD Partai Keadilan Sejahtera yang telah berkenan memberikan izin penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari semua pihak agar terciptanya skripsi yang berkualitas

Semarang, 17 November 2022

Penulis

PERSEMBAHAN

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas rahmat-Nya, skripsi yang berjudul “**Pengembangan *Party Identification* dan Tantangannya di Era Reformasi : Studi Kasus di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal**” dapat terselesaikan meskipun masih banyak kekurangan. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Imam Chanif dan Ibu Siti Sundari yang tanpa kenal lelah memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang tidak pernah terputus, serta untuk almamater tercinta, UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Politik bukanlah perebutan kekuasaan bagi partai politik, bukan pula persaingan untuk menonjolkan ideologinya sendiri-sendiri, akan tetapi untuk menyelamatkan dan menyelesaikan revolusi Indonesia”

- Ir. Soekarno -

ABSTRAK

Problematika yang berkaitan dengan politik di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah rendahnya tingkat *Party-Identification (Party-ID)* atau ikatan kedekatan antara partai politik dengan pemilih. Selama ini, permasalahan tersebut masih belum diperhatikan secara serius. Padahal, rendahnya ikatan psikologis antara masyarakat dan pemilih akan memunculkan persoalan baru baik itu sebelum pemilu maupun setelah pemilu, yakni politik uang, praktek korupsi, serta pragmatisme yang menyebabkan biaya politik di Indonesia sangat tinggi. Dalam tulisan ini akan dibahas upaya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal dalam meningkatkan *Party-ID* sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat.

Party-ID atau identifikasi partai politik merupakan kemampuan masyarakat dalam mengidentikkan diri kepada partai politik tertentu. *Metode* penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengedepankan wawancara kepada pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal guna mendapatkan hasil yang optimal dilengkapi dengan beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan Partai dalam upaya meningkatkan kedekatan dengan masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan *Party-ID*. Diantara adalah dengan mewujudkan partai sebagai wadah aspirasi masyarakat, menyelenggarakan program sosial, melakukan pembinaan secara berkelanjutan, serta mempertahankan kualitas anggota dewan yang berasal dari kader internal partai. Dalam menghadapi berbagai tantangan seperti massifnya isu negatif dari eksternal dan budaya politik pragmatis yang cukup massif, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten secara rutin mengadakan konsolidasi, menunjukkan sikap sebagai partai terbuka serta meningkatkan kualitas komunikasi politik kepada masyarakat.

Kunci: PKS, *Party-ID*, Demokrasi

ABSTRACT

Political problem in Indonesia are very diverse, such as the low level of Party-Identification (Party-ID) or a close bond between the political party and the voters. This problem still didn't get a much exposure so far. Even though, the low level of the emotional bond between the society and political party will create another problem either before or even after the election. These problems are money politic, corruption, and also political pragmatism will increase a political cost in Indonesia. This paper will explain how Partai Keadilan Sejahtera increasing a level of Party-ID and solve such a problem at the same time.

Party-ID is the ability of people to identify themselves with certain political parties. This paper will use a qualitative description method which choose an interview as a primary source. An interview with DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal officer to found a maximum result with an event documentary as a secondary source.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal made a various things to develop their Party-ID. Create an aspirational party, held several social programs, a continuously member development and maintain the quality of the board member of the internal party council. In the face of challenges like negative issues from external and pragmatic political culture, Partai Keadilan Sejahtera made a routine consolidation, declare as an open party and improving the quality of political communication to the society.

Keywords: PKS, Party-ID, Democracy

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis penelitian	15
2. Sumber dan jenis data	15
3. Teknik pengumpulan data	16
4. Teknik analisis data.....	18
5. Kerangka Teori.....	18
a. Teori Partai Politik	18
b. Teori <i>Party-Identification</i>	18
c. Definisi Konseptual.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Partai Politik	19
B. Teori <i>Party-Identification</i>	24

BAB III PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TEGAL	29
A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	29
B. Nama dan Lambang Partai	32
C. Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera.....	34
D. Prinsip Partai Keadilan Sejahtera.....	36
E. Gambaran Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal.....	39
F. Visi Misi.....	40
BAB IV PENGEMBANGAN PARTY-IDENTIFICATION OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TEGAL	42
A. Upaya Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan <i>Party- Identification</i> di Kabupaten Tegal	42
B. Tantangan Saat Mengembangkan <i>Party-Identification</i>	58
C. Solusi Dalam Mengembangkan <i>Party-Identification</i>	69
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
C. Implikasi Teori <i>Party-Identification</i>	80
Daftar Pustaka	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo PKS	32
Gambar 2 Kegiatan Reses Anggota DPRD PKS Kab Tegal.....	44
Gambar 3 Kegiatan Pelatihan Hidroponik	46
Gambar 4 Kegiatan "Pengin Kaya"	47
Gambar 5 Kegiatan Pelatihan Konselor RKI	47
Gambar 6 Kegiatan Senam Bersama Masyarakat	48
Gambar 7 Penyerahan Bantuan kepada Korban Banjir Warureja.....	49
Gambar 8 Penerjunan Perahu Karet untuk Distribusi Logistik.....	49
Gambar 9 Kegiatan Jum'at Berkah	50
Gambar 10 Kegiatan Bakti Sosial di Suradadi.....	50
Gambar 11 Kegiatan Sekolah Orang Tua	51
Gambar 12 Kegiatan Pendidikan Kader dan Peningkatan Kualitas Amggota.....	54
Gambar 13 Kegiatan Pembinaan Rutin di Kantor DPD PKS Kab. Tegal.....	71
Gambar 14 Kegiatan Rakerda DPD PKS Kab. Tegal	77
Gambar 15 Kegiatan Festival Seni Budaya.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan salah satu wadah untuk mencari, mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program – program yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat berdasarkan ideologi tertentu (Surbakti, 1992:149). Hal ini tercermin dari UUD 1945 pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu. Selain itu, pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik. Dalam pelaksanaannya, partai politik diatur dalam UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik. Undang – undang tersebut mengatur bagaimana kedudukan dari partai politik serta tentunya bagaimana peran dan fungsi yang dimiliki oleh partai politik. Partai politik tentunya memiliki nilai atau norma yang dijadikan sebagai acuan ataupun pegangan organisasi. Partai politik sering kali dibangun berdasarkan kesamaan dari ideologi tertentu. Ideologi di dalam partai politik memiliki fungsi untuk memastikan bahwa urusan-urusan publik bisa terselesaikan ataupun dapat menemui titik terang yang menghasilkan *win-win solution* - bagi publik.

Salah satu problematika politik pada saat ini adalah begitu rendahnya *party-identification* (*party-ID*) di Indonesia. *Party-ID* merupakan ikatan kedekatan masyarakat dengan partai politik yang nantinya akan dipilih pada penyelenggaraan pemilu. Saiful Mujani Research Center (SMRC) melaksanakan sebuah survei yang menyatakan bahwa pada bulan Desember tahun 2017, tingkat kedekatan masyarakat Indonesia dengan partai politik hanya berkisar di angka 11,7 persen. Serta pada salah satu studi komparatif dunia, angka tersebut membuat Indonesia tercatat sebagai

salah satu negara yang memiliki tingkat *party-ID* paling rendah di dunia (Reinjani, 2018).

Tingkat *party-ID* yang rendah di Indonesia, selama ini tidak terlalu dijadikan sebagai permasalahan demokrasi. Sementara itu, apabila diteliti lebih jauh, angka *party-ID* yang rendah tersebut menjadi sumber permasalahan turunan yang lainnya. Beberapa permasalahan yang cukup serius muncul akibat dari rendahnya tingkat *party-ID* di Indonesia. *Pertama*, rendahnya *party-ID* mengakibatkan tingginya biaya politik di Indonesia.

Jika menilik ke beberapa negara yang memiliki tingkat *party-ID* yang tinggi, warga negara tersebut mempunyai rasa memiliki terhadap suatu partai, sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan kontribusi kepada partai tersebut untuk mencapai kemenangan pada politik electoral, menggunakan cara-cara sendiri serta bersifat suka rela. Warga negara tersebut bahu membahu mengumpulkan dana, melakukan mobilisasi suara, serta berbagai aktivitas lainnya yang bersumber dari keinginan mereka sendiri karena memang tingkat kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap partai politik cukup tinggi. Namun sayangnya, hal tersebut masih belum terlihat di Indonesia. Praktik voluntarisme politik yang muncul dari keinginan warga pribadi guna memenangkan partai politik yang didukung nampaknya masih belum terlalu terlihat secara konkrit dan massif. Seperti dalam pelaksanaan pemilu legislatif, para calon anggota legislatiflah yang bekerja keras guna mendulang suara sebanyak-banyaknya. Salah satu cara *instan* yang dilakukan caleg guna menggaet para pemilih adalah dengan 'membeli' suara pemilih. Cara ini dipandang oleh para caleg sebagai strategi yang praktis agar meyakinkan masyarakat untuk memilih caleg tersebut. (Reinjani, 2018).

Padahal, praktik politik uang tersebut tentunya merugikan banyak pihak, baik dari caleg maupun dari warga itu sendiri. Di satu sisi, caleg perlu menyiapkan modal dalam jumlah yang cukup besar guna dan di sisi yang lain, praktik *politik uang tentunya* tidak mencerdaskan public karena warga yang terbiasa menerima uang sebelum pelaksanaan pemilu, akan

bergantung kepada calon mana yang memberikan uang atau barang lain dengan jumlah yang paling besar (Reinjani, 2018).

Selanjutnya, rendahnya tingkat *party-ID* secara tidak langsung menjadi penyebab terjadinya praktek korupsi. Biaya politik yang tinggi khususnya ketika proses pemilu berjalan sehingga partai mau tidak mau harus mencari modal dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan kader-kader partai politik yang berada di lembaga legislatif dan eksekutif. Kedua lembaga tersebut tentu sarat akan proses penganggaran sehingga sering sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum guna kepentingan pribadi atau bahkan partainya (Reinjani, 2018).

Kemudian, tingkat *Party-ID* yang rendah akan membuat partai politik semakin didominasi dan dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena publik tidak memiliki akses untuk mengontrol partai politik akibat rendahnya kedekatan atau rasa kepemilikan masyarakat terhadap partai politik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partai politik tidak sejalan dengan keinginan pemilihnya dan partai politik tidak mampu mengadvokasi kepentingan dari masyarakat umum (Basrianto, 2018).

Salah satu partai politik yang memiliki ideologi dan identitas yang kuat dan mengakar adalah Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini dikenal masyarakat sebagai partai politik pembawa aspirasi keagamaan. Partai ini muncul pada awal masa Reformasi tahun 1998 dan memiliki latar belakang kelompok muda Islam yang memiliki tugas untuk berdakwah umumnya di lingkungan kampus-kampus besar (Lembaga Dakwah Kampus). Partai Keadilan Sejahtera menjelma menjadi salah satu partai Islam yang cukup di perhitungkan ketika berhasil mengikuti serangkaian Pemilihan Umum dari tahun 1999 hingga yang terbaru yakni tahun 2019 yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sudah lebih dari 20 tahun Partai Keadilan Sejahtera memiliki keterlibatan dalam kancah perpolitikan nasional dan semakin memperluas pengaruhnya di masyarakat hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

Daerah di mana Partai Keadilan Sejahtera cukup terlihat eksistensinya adalah di Kabupaten Tegal. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal dikenal cukup aktif terutama ketika terjadi bencana di wilayah Kabupaten Tegal. Berikut ini merupakan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Tegal

Tabel 1

No.	Tahun Pemilu	Perolehan Suara Legislatif Kab. Tegal	Perolehan Kursi
1	2004	36483	3
2	2009	48036	5
3	2014	44456	3
4	2019	43786	2

Sumber : kab-tegal.kpu.go.id

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebenarnya Partai Keadilan Sejahtera sudah cukup dikenal oleh masyarakat meskipun perolehan suaranya cenderung menurun. Meskipun sebenarnya kiprah Partai ini cukup terlihat dalam bidang sosial yang diimplementasikan melalui beberapa program seperti tanggap bencana, jum'at berkah, dan bakti sosial yang digelar secara rutin. Selain program yang bersifat umum, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal tentunya memiliki kegiatan khusus bagi kader internal partai. Seperti pada bulan april lalu ketika Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal mengadakan acara seminar bincang bisnis guna membangkitkan semangat kewirausahaan bagi para kadernya. Ada pula kegiatan kemah kebangsaan yang diikuti oleh kader internal. Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat soliditas kader dan meningkatkan kecintaan terhadap NKRI ini dihadiri salah satu figur yang berpengaruh di kalangan internal partai, yakni Dr. Abdul Fikri Faqih, MM yang merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Tengah periode 2010 - 2015. Selain itu, hadir pula Danramil Bojong, Kapten Arh. Asep Koswara yang memberikan materi tentang wawasan kebangsaan (PKS Kab. Tegal, 2020)

Dari beberapa fakta tersebut, tentu menjadi daya tarik peneliti untuk mendalami Partai Keadilan Sejahtera dalam mengembangkan *party-ID* di wilayah Kabupaten Tegal. Terlebih saat ini cara-cara pragmatis sudah semakin gencar dilakukan oleh partai politik demi meningkatkan elektabilitas dan tentunya meraih kekuasaan. Apakah nantinya Partai Keadilan Sejahtera tetap mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat dan meningkatkan keterikatan dengan konstituen atau justru membuat langkah pragmatis dengan segala kondisi dan tantangan yang akan dihadapi.

B. Rumusan Masalah

Menilik latar belakang di atas, bisa dirumuskan permasalahan yang lebih konkret, yaitu bagaimana Partai Keadilan Sejahtera mengembangkan *party-identification* di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal mampu mengembangkan *party-identification* baik di kalangan kadernya maupun masyarakat umum.

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memperluas wawasan peneliti sendiri maupun masyarakat luas dalam bidang ilmu politik khususnya dalam ranah partai politik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengembangan *party-ID* serta mampu untuk mengimplementasikannya di masa yang akan datang.

b. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan pembaca bisa mengetahui sejauh mana pentingnya *party-ID* agar kedepannya

mampu mengidentifikasi dan memilih partai politik yang relevan serta memiliki kesamaan visi dengan pembaca.

c. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan dalam ranah ilmu politik dan menjadi referensi bagi universitas guna memperkaya studi tentang partai politik.

d. Bagi politisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan nantinya bisa menjadi pertimbangan para politisi agar lebih aspiratif dan dekat dengan konstituennya guna mempertahankan hubungan yang harmonis.

e. Bagi konstituen PKS Kabupaten Tegal

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para konstituen Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal mampu meningkatkan sikap loyalitas melalui berbagai macam agenda yang dilaksanakan partai.

D. Tinjauan Pustaka

Secara garis besar, tinjauan pustaka merupakan kumpulan studi literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik itu skripsi, jurnal ataupun buku. Tinjauan pustaka ini cukup komprehensif sehingga semua bagian dapat dipahami secara konseptual dan teoritis. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu

Pertama, Skripsi *Party-Id* Dan Tendensi Politik Uang Di Provinsi Bali : Studi Kasus Pilkada Bali Tahun 2018 yang dibuat oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Achmad Basyir pada tahun 2020. Di dalam skripsi ini dijelaskan, Bali pada tahun 2018 menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat identifikasi partai politik cukup tinggi di Indonesia. Namun, hal ini justru dibarengi dengan angka praktik politik uang yang bisa dikatakan cukup tinggi. Data yang diperoleh mengonfirmasi pandangan apabila pemilih yang memiliki tingkat identifikasi partai politik yang tinggi, maka akan dijadikan

objek *money politic*. Tingkat *party-ID* yang cukup tinggi di satu sisi menjelaskan bahwa masyarakat Bali masih cukup mempercayai partai politik. Namun, hal positif tersebut dibarengi pula dengan tendensi praktik politik uang juga mengalami peningkatan. Secara tidak langsung, hal ini menandakan bahwa pragmatisme masyarakat juga mengalami pemeningkatan. Fenomena tingginya praktik *money politic* di wilayah Bali yang notabene memiliki tingkat *party-ID* yang tinggi ini diakibatkan koneksi kontestan pemilu dengan tim sukses yang cenderung mengacu pada hal yang bersifat materiil guna meraih kekuasaan untuk selanjutnya mengeruk sumber daya yang sebesar-besarnya (Kadek Dwita Apriani, Irhamna, 2020).

Kedua, Tulisan berjudul Relasi Politik Uang dan *Party-ID* di Indonesia dibuat oleh Iradhad Taqwa Sihidi dkk tahun 2019. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa pada saat ini Kondisi Identifikasi Partai Politik (*Party-ID*) masyarakat Indonesia pasca reformasi justru semakin melemah. Salah satu yang menjadi penyebab adalah partai politik yang secara terbuka belum berhasil memerankan fungsi partai politik dengan maksimal, seperti fungsi kaderisasi, komunikasi, artikulasi serta sosialisasi politik. Hal ini harusnya mampu dipahami oleh partai politik untuk kemudian dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi guna mempertahankan eksistensi partai politik di Indonesia.

Rendahnya *Party-ID* pada kenyataannya berkaitan langsung dan kuat dengan praktik politik uang hingga saat ini. Pemilih pragmatis (*floating mass*) berasosiasi dengan partai politik yang secara jelas menginginkan dukungan. Hubungan keduanya tentu sangat kental dengan nuansa pragmatisme dengan uang sebagai perekatnya. Jika tidak dirubah dan tidak adanya pendidikan politik yang memadai, maka pola ini akan berlangsung di masa yang akan datang sehingga

partai politik akan gagal dalam melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh.

Memang sulit dipungkiri bahwa politik elektoral di Indonesia sarat akan hal-hal yang bersifat materialisme. Calon-calon yang bertarung memerlukan biaya pemenangan yang besar guna memenangkan politik elektoral. Salah satu opsi yang cukup efektif guna mencegah mahalnya pembiayaan politik yakni mengoptimalkan fungsi partai politik sebagai representasi masyarakat. Jika partai politik mampu mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat secara optimal maka tentunya kepercayaan publik akan semakin meningkat dan praktek politik uang dapat ditekan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya partai politik harus melaksanakan reformasi kelembagaan secara menyeluruh, melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui program-program pendidikan politik serta pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Selain itu, partai politik juga harus mampu mengadvokasi kebutuhan dan berbagai persoalan yang ada di masyarakat serta memperjuangkan kepentingan umum (Iradha, Khanifah, Romadhan, 2019).

Ketiga, tulisan berjudul *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia* ditulis oleh Haryanto pada tahun 2014. Pada tulisan ini, ditemukan fakta bahwa Identifikasi partai politik sudah mulai mengakar di tataran politik lokal Sulawesi Selatan. Para pemilih sudah tidak lagi menjadikan kedekatan, baik kedekatan etnik maupun kedekatan kedaerahan dalam memilih calon pemimpinnya. Pemilih cenderung mengidentikkan dengan partai politik, dan selanjutnya menentukan pilihannya pada calon yang diusung oleh partai tersebut. Selain itu, ada pula faktor lain yakni tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan incumbent.

Dalam penelitian ini, tidak ada fakta kuat yang menjelaskan bahwa tokoh yang terkenal di tingkat lokal yang notabene memiliki

jaringan personal yang kuat ataupun tokoh yang memiliki dominasi terhadap suatu partai akan memenangkan kontestasi politik elektoral dengan mudah. Hal ini dibuktikan dari dua kabupaten yang diteliti, tokoh politik yang memiliki popularitas tinggi di kabupaten, terbukti tidak mampu untuk menang dalam pemilu. Sedangkan, mesin-mesin partai mengambil peran yang cukup kuat dalam memobilisasi pilihan politik pemilih di dua kabupaten tersebut.

Namun di sisi lain, ketika pemilih sudah mulai tumbuh rasa kesadaran ideologis dalam memilih partai politik, tidak dibarengi oleh kesadaran ideologis elit partai. Hal ini terbukti dari begitu mudahnya elit politik bermanuver seperti “kutu loncat”, berpindah dari satu partai ke partai lain demi kekuasaan belaka, sebagaimana yang terjadi dalam Pilgub Sulawesi Selatan tahun 2013. Sehingga, guna mewujudkan proses politik yang ideal, harus melewati beberapa proses lagi hingga pada akhirnya terwujud kesadaran yang tinggi (Haryanto, 2014).

Keempat, Artikel Jurnal yang berjudul Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia : Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “*Party-ID*” dan Patron-Klien oleh Buhanuddin Muhtadi tahun 2013. Tulisan ini membahas tentang kaitan antara identifikasi partai politik dengan budaya patron-klien yang sangat membudaya di masyarakat, karena memang masih marak ditemukan masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu, bukan karena faktor kedekatan dengan partai politik, ataupun kesamaan ideologi, visi dan misi dengan partai tersebut, melainkan karena uang atau apapun yang bersifat material yang diberikan oleh kontestan politik, atau *money politics*. Banyak peserta pemilu yang memilih masyarakat dengan kondisi menengah kebawah untuk dijadikan target *vote buying* dengan memberikan iming-iming berupa uang atau hal yang bersifat material lainnya. menawarkan uang atau hadiah yang lain. Faktor rendahnya

identifikasi partai politik cukup berpengaruh terhadap maraknya praktik politik transaksional ini, karena masyarakat yang memiliki tingkat *party-ID* yang tinggi, akan cenderung stabil dalam memberikan dukungan terhadap partai politik tertentu dan tidak mudah dipengaruhi oleh politik transaksional. *Party-ID* yang rendah juga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sehingga semakin menjauhkan Partai Politik dari masyarakat. Hal ini terbukti dari semakin menurunnya tingkat *party-ID* yang dibarengi dengan maraknya *money politic* di masyarakat. Tren menurunnya *party-ID* di Indonesia ini dipengaruhi oleh kinerja partai politik yang dinilai masih buruk oleh pemilih. Publik semakin menunjukkan ketidakpercayaan terhadap partai politik seiring dengan terungkapnya berbagai macam kasus korupsi dari tokoh-tokoh ataupun kader partai politik. Apabila partai politik abai terhadap fenomena ini dan tidak melakukan perbaikan dan pembenahan, maka bisa dipastikan pemilih akan semakin menjauhi partai dan *political cost* akan semakin meningkat dikarenakan masyarakat akan memilih partai politik menggunakan pendekatan transaksional.

Jika permasalahan politik transaksional ini tidak segera diselesaikan, maka akan menimbulkan permasalahan pelik yang terkait akuntabilitas dan demokrasi. Maraknya praktek *vote buying* akan merusak akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan, baik dalam lembaga legislatif ataupun eksekutif (Burhanuddin, 2013)

Kelima, tesis yang berjudul Pengaruh Faktor Identifikasi Partai Politik dan Faktor Kandidat Terhadap Perilaku Memilih Dalam Pemilukada Kabupaten Tabanan – Bali Tahun 2010 yang ditulis oleh Kadek Dwita Apriani. Tulisan ini membahas tentang keterpilihan calon perempuan dalam Pilkada Tabanan 2010. Calon perempuan yakni Eka Wiryastuti yang notabene berasal dari kasta sudra mampu mengalahkan kandidat *incumbent* yang berasal dari kasta ksatria serta

mampu mengalahkan pula kandidat lain yang memiliki elektabilitas tertinggi ketika diadakan survei sebelum pilkada dilakukan. Dalam tulisan ini, peneliti membahas tentang faktor identifikasi partai politik dalam mempengaruhi perilaku politik pemilih serta faktor kandidat dalam mempengaruhi perilaku politik pada Pilkada Tabanan tahun 2010.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa antara identifikasi partai politik masyarakat Tabanan dengan perilaku memilih memiliki keterkaitan yang cukup erat pada Pilkada Tabanan tahun 2010, terlebih identifikasi masyarakat dengan partai terkuat di Tabanan, yakni PDIP. Hal ini pula yang menjadi faktor terbesar sehingga Eka Wiryastuti yang hanya memiliki elektabilitas 5% pada survei yang dilaksanakan pra pemilu, dapat meraup suara 48% pada kontestasi Pilkada Tabanan tahun 2010. Hal ini terjadi karena mayoritas masyarakat merupakan pemilih setia PDIP di Tabanan, sehingga masyarakat cenderung memilih siapapun pasangan yang diusung oleh PDIP ketika Pilkada Tabanan 2010. Sehingga dengan kata lain, pemilih setia PDIP mengutamakan partai apa yang mengusung kandidat yang mereka pilih. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kandidat yang dulunya merupakan kader PDIP namun diusung oleh partai lain saat Pilkada Tabanan tahun 2010, terlihat masih membawa identitasnya sebagai kader PDIP padahal secara jelas sudah dicalonkan oleh partai lain. Calon tersebut menyadari masih cukup tingginya jumlah pemilih loyal PDIP di Tabanan.

Di sisi lain, meskipun ada beberapa pemilih PDIP yang mengalihkan dukungan pada Sukaja, namun hal ini disinyalir karena Sukaja yang memang sejak awal merupakan kader PDIP, tetapi pada Pilkada Tabanan tahun 2010 diusung oleh Partai Golkar. Sukajapun nampak lebih menonjolkan diri sebagai kader PDIP daripada menunjukkan diri sebagai kandidat yang diusung Golkar ketika periode kampanye. Sehingga sebagian pemilih setia PDIP memilih

Sukaja karena menilai bahwa Sukaja merupakan bagian dari PDIP. Hal itu juga menunjukkan bahwa kuatnya faktor partai politik (PDIP) dalam perilaku memilih masyarakat Tabanan. Selain itu, fenomena solidnya PDIP di Tabanan juga menegaskan bahwa partai lain belum memiliki akar yang kuat di Tabanan dan cenderung menunjukkan kinerja yang pasif ketika Pilkada Tabanan tahun 2010. Tidak dapat dipungkiri adanya perpecahan suara pemilih PDIP saat pemilukada Tabanan akibat pencalonan tiga kader PDIP sebagai bupati Tabanan melalui partai yang berbeda. Pemilih yang memilih pasangan Sukaja-Ngurah Anom yang dicalonkan Golkar justru banyak berasal dari pemilih PDIP dibandingkan pemilih Golkar. Tetapi jumlah pemilih PDIP yang memilih pasangan yang diusung PDIP yaitu Eka Wiryastuti-Sanjaya masih lebih banyak.

Faktor kandidat pada Pilkada Tabanan tahun 2010, tidak seluruhnya dinilai penting oleh masyarakat, melainkan hanya beberapa yang dianggap sebagai hal terpenting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin Tabanan. Kepedulian pada masyarakat, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat Tabanan dan juga kejujuran adalah tiga hal yang dinilai harus dimiliki pemimpin di Tabanan. Hanya sedikit responden yang menyatakan pendidikan dan pengalaman calon pemimpin merupakan hal terpenting dan harus dimiliki oleh kandidat yang mereka pilih. Dengan demikian, dapat dikatakan faktor identifikasi partai politik dan kandidat memiliki hubungan dengan perilaku memilih masyarakat pada Pilkada Tabanan tahun 2010 (Kadek, 2012)

Keenam, tulisan berjudul *Dinamika Perempuan Berpolitik : Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi* yang ditulis oleh Mochamad Parmudi, Tulus Warsito, dan Sidik Jatmika tahun 2018. Di dalam jurnal ini, dijelaskan pada era reformasi, peran perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Kebumen

mengalami peningkatan. Terbukti dari terpilihnya bupati perempuan yakni Rustriningsih selama dua periode yakni dari tahun 2000-2005 dan 2005 – 2010 dimana pada tahun 2008, beliau terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan Bibit Waluyo. Selain itu, indikator lain yang menunjukkan peningkatan peran perempuan ranah perpolitikan di kebumen adalah terpilihnya 3 kader perempuan sekaligus dari Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Ketiga kader yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kebumen tersebut adalah Erni Kristanti, Herni Ning Susanti, dan Nur Hidayati.

Selain itu, keberadaan Partai Keadilan Sejahtera yang cukup eksis dan mudah diterima oleh masyarakat tidak lepas dari strategi pendekatannya ke masyarakat melalui bidang keagamaan, pendidikan, budaya, sosial dan ekonomi dan tidak membawa misi dakwah guna menghindari perbedaan paham dengan masyarakat yang didominasi warga *Nahdliyin*. Memang, penggunaan beberapa strategi tersebut membuat Partai Keadilan Sejahtera lebih mudah diterima masyarakat. Akan tetapi, strategi yang mengarah pada inklusifitas partai tentunya akan berpotensi melunturkan citra Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah yang nantinya akan membuat Partai Keadilan Sejahtera terlihat seperti partai yang memiliki sikap pragmatis, permisif dan kompromis dalam berpolitik (Parmudi, Warsito, Jatmika, 2018).

Ketujuh, skripsi berjudul Idealisme dan Pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera : Implementasi Rekrutmen Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 dibuat oleh Supratmono pada tahun 2017 di Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Inten Lampung. Dalam skripsi ini, dijelaskan bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pesawaran melakukan proses penjaringan untuk mencari kader terbaik yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2017. Proses penjaringan ini dilakukan

secara tertutup sehingga murni hanya bisa diikuti oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera. Pelaksanaan penjaringan ini dilaksanakan dengan musyawarah anggota untuk menentukan kader yang akan diajukan dalam Pilkada Kabupaten Pesawaran dengan mempertimbangkan ketokohan serta kesamaan visi dan misi. Sebenarnya, DPD Partai Keadilan Sejahtera sudah mengantongi nama yang akan diajukan yakni Drs. A. Muzammil Yusus, M.Si.

Namun pada akhirnya, keputusan dibatalkan dan memilih mengusung Dendi – Eriawan. Pasangan Dendi – Eriawan merupakan satu-satunya pasangan calon yang diusung partai politik yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS serta didukung Partai Golkar, PPP, dan Partai Hanura. Selain itu, keputusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pesawaran mengusung pasangan Dendi – Eriawan karena kedekatan dengan Zulkifli Anwar yang merupakan Mantan Bupati Lampung sekaligus ayah dari Dendi Romadhona. Zulkifli Anwar pernah diusung PKS dalam Pilgub Lampung tahun 2008.

Hal ini menandakan bahwa proses pengkaderan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Pesawaran belum maksimal karena belum mampu memunculkan sosok kader yang berkualitas dan diterima masyarakat luas dan Partai Keadilan Sejahtera bersikap pragmatis dengan mengusung calon yang sudah diusung lebih dari 4 partai politik serta bukan berasal dari kalangan internal partai (Supratmono, 2017)

Penelitian-penelitian di atas secara garis besar membahas tentang dinamika *party-identification*, baik dari segi keterkaitannya dengan *money politic*, ataupun mulai bangkitnya *party-ID* di salah satu wilayah di Indonesia. Selain itu, ada pula penelitian yang berkaitan dengan mulai berubahnya arah politik Partai Keadilan Sejahtera menjadi cenderung lebih pragmatis.

Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas sejauh mana Partai Keadilan Sejahtera mampu mengembangkan *party-ID* di Kabupaten Tegal dengan segala problematika yang ada di masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dan strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan serta analisis data guna menjawab persoalan yang diteliti.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena ingin menggali permasalahan secara detail dan mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study research*). Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah problematika dengan menggali informasi dari berbagai macam sumber yang terkait dan relevan untuk kemudian diolah guna memperoleh solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yakni menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Metode penelitian ini lebih sering menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. (Sandu Siyoto, 2015)

2. Sumber dan jenis data

Dalam sebuah penelitian membutuhkan sumber data yang konkrit yang ditemukan secara langsung atau konkrit. Data yang diperoleh dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti harus mengambil data secara langsung kepada narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari berbagai kepustakaan seperti perpustakaan, media cetak ataupun online, arsip partai serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

3. Teknik pengumpulan data

Di dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan dalam penelitian. Selain itu, wawancara juga bisa diartikan sebagai proses dialog antara pewawancara dengan narasumber atau yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan narasumber. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi yang cukup akurat dari narasumber yang memiliki kapabilitas yang berkaitan dengan problematika yang dibahas. Narasumber dalam hal ini adalah Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal, Arip Budiono, S.Ip dan Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal, Ahsinuddin, S.Kom. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal guna mendapatkan informasi tambahan guna menunjang pembahasan penelitian.

b. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati gejala – gejala serta proses yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal dalam melaksanakan aktivitas kepartaian khususnya yang berkaitan dengan agenda politik partai dalam rangka menjaga identitas kepartaian. Observasi yang dilaksanakan oleh peneliti adalah jenis obsevasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat langsung dan hanya memposisikan diri sebagai pengamat independen. Peneliti menggunakan teknik ini karena hanya memfokuskan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Observasi ini dilakukan dengan mendatangi Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal.

c. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan sarana guna membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Kajian pustaka dapat diperoleh melalui surat-surat, notulensi maupun catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (Sarwono, 2006)

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari berbagai tulisan dan dokumen. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai data yang memiliki kaitan dengan pembahasan penelitian ini, yakni melalui buku-buku, brosur, berita dan media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa profil lembaga (sejarah, visi dan misi, prinsip Partai Keadilan Sejahtera), struktur kader dan kepengurusannya, kegiatan kepartaian yang berkaitan dengan penelitian ini serta aktivitas lainnya yang berkaitan berupa foto atau gambar.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk memproses data yang diperoleh agar mendapatkan informasi. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tujuan dari analisis data adalah menemukan fakta dan makna dibalik data yang didapatkan dari hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Metode ini mengulas data melalui rangkaian kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan. Selain itu, metode ini digunakan untuk membuat data atau hasil penelitian nantinya mudah untuk dipahami.

5. Kerangka Teori

a. Teori Partai Politik

Secara garis besar, partai politik ialah suatu kelompok yang terorganisir serta memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini tentunya untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut tahta kekuasaan dengan cara konstitusional guna menjalankan kepentingannya.

b. Teori *Party-Identification*

Party-ID atau Identifikasi Partai Politik adalah hubungan yang stabil antara pemilih dan partai politik tertentu, serta membuat pemilihnya tidak terpengaruh oleh faktor jangka pendek dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam konteks ini, beberapa orang akan dikategorikan sebagai identifikasi yang kuat, lemah, ataupun netral.

c. Definisi Konseptual

Party-ID merupakan ikatan psikologis antara masyarakat dan partai politik yang mempengaruhi seseorang untuk memilih partai tersebut karena merasa terwakili, ataupun tidak memilih sama sekali karena tidak ada partai politik yang dianggap mampu merepresntasikan pemilih tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Partai Politik

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, dan preposisi yang telah disusun rapi dan sistematis sehingga bisa dijadikan dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Kerangka teori menjadi pedoman dalam melakukan penelitian sehingga peneliti tidak keluar dari topik pembahasan utama. Kerangka teori juga dapat dijadikan pedoman oleh pembaca sehingga lebih mudah dalam memahami hasil penelitian tersebut. Sehingga dalam penelitian, dibutuhkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Secara garis besar, partai politik ialah suatu kelompok yang terorganisir serta memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini tentunya untuk mendapatkan kekuasaan politik dan merebut tahta kekuasaan dengan cara konstitusional guna menjalankan kebijakan - kebijakan mereka (Budiardjo, 1999).

Selain itu, partai politik adalah organisasi politik yang menjadi wadah aspirasi masyarakat. Partai politik menjadi bagian penting dari sistem politik, baik di negara berkembang maupun negara maju. Pendapat dan aspirasi dari individu atau kelompok akan hilang kecuali diterima dan disalurkan kepada yang berwenang. Gabungan pendapat dan sikap dari beberapa kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan akan dipadukan menjadi sebuah “penggabungan kepentingan”. Hal ini tentunya merupakan input bagi pemerintah yang berkuasa. Sebaliknya, jika opini dan sikap tidak terakumulasi dengan baik, maka akan terjadi persaingan kepentingan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya berujung pada anarki. Dengan kata lain, partai politik bertugas mengatur kehendak rakyat yang sangat dinamis.

Selain itu, Sigmund Neumann berpendapat bahwa Partai politik adalah yaitu organisasi artikulatif yang berfokus pada persaingan untuk

mendapatkan dukungan public dan meraih kekuasaan, serta mendapatkan dukungan pula dari berbagai golongan yang lain, karena partai politik dianggap cukup mumpuni sebagai mediator yang mampu mengintegrasikan kekuatan sosial dan lembaga pemerintahan. Sehingga, partai politik bisa dikatakan sebagai organisasi yang memiliki arah yang sama pada nilai dan cita-cita serta bertujuan untuk mencapai kedaulatan politik dengan memperoleh kekuasaan.

Menurut Ramlan Surbakti (1992), Partai politik memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:

1. Memiliki akar yang kuat pada tataran masyarakat lokal;
2. Melakukan aktivitas secara berkesinambungan;
3. Berupaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan;
4. Berpartisipasi dalam pemilu
5. Memiliki ideologi;
6. Meningkatkan kesadaran nasional guna mencapai kemerdekaan (dalam konteks negara yang masih dijajah).

Selain itu, Partai Politik memiliki setidaknya lima peran yang harus dijalankan guna meningkatkan kualitas masyarakat dalam kehidupan bernegara yang demokratis yakni :

1. Artikulasi Kepentingan

Setiap individu maupun masyarakat sebagai warga negara tentunya memiliki masing-masing kepentingan. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa selaras ataupun berbeda-beda atau bahkan bertolak belakang satu sama lain. Partai-politik harus bisa menjalankan perannya dalam mengintegrasikan kepentingan-kepentingan rakyat dalam berbagai proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik, sehingga berbagai kepentingan dari rakyat tersebut mampu terlayani oleh kebijakan publik yang diciptakan oleh pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Apabila partai politik mampu

menjalankan peran dan fungsinya dalam mengajukan kepentingan rakyat, maka partai tersebutlah yang kemungkinan akan mendapatkan dukungan dari rakyat. Begitupun sebaliknya, jika partai politik tidak mampu bersuara untuk kepentingan rakyat, maka perlahan-lahan konstituen akan meninggalkan partai politik tersebut.

2. Agregasi Kepentingan

Partai politik harus memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan rakyat yang merupakan tuntutan menjadi berbagai macam solusi terbaik yang memenuhi aspirasi rakyat dalam proses perumusan kebijakan. Dibutuhkan intelektualitas yang tinggi dalam mengintegrasikan beragam kepentingan yang terkadang bertolak belakang tersebut menjadi solusi alternatif terbaik. Memang dalam pelaksanaannya tidak mudah, karena tekanan akan muncul dari berbagai macam arah agar masing-masing kepentingan dapat terakomodir. Namun disinilah peran partai politik dalam mengagregasikan kepentingan dari rakyat sehingga membutuhkan anggota partai yang cakap dan mumpuni dalam bidangnya masing-masing.

3. Sosialisasi Politik

Setiap negara memiliki etika dan norma politik, yang dipandang baik di masing-masing negara yang bersangkutan. Partai politik memiliki peran untuk mensosialisasikan nilai-nilai norma dan etika politik secara menyeluruh kepada warga negara. Seperti di Indonesia, maka nilai-nilai serta etika politik yang berlaku adalah perilaku politik yang searah 4 pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sosialisasi ini idealnya harus dilakukan dalam jangka panjang dan berkesinambungan, sehingga nilai-nilai norma dan etika politik yang berlaku dapat terinternalisasi

dengan baik dan mampu diimplementasikan secara konkrit oleh warga negara. Partai politik yang tidak melaksanakan sosialisasi politik kepada warganya tentu akan dipertanyakan komitmen partainya kepada negara. Sudah seharusnya pula masyarakat mampu untuk bersikap kritis terhadap partai politik yang tidak melakukan edukasi dan sosialisasi politik kepada warga negaranya.

4. Rekrutmen Politik

Partai politik memiliki wewenang untuk memposisikan kader-kadernya pada jabatan struktural politik di pemerintahan guna menyalurkan dan mengajukan kepentingan partai dan merepresentasikan rakyat yang diwakili. Partai politik harus mampu menjalankan perannya dalam melaksanakan rekrutmen politik agar nantinya terdapat kader-kader yang mumpuni dan berkualitas yang ditempatkan dalam jabatan pemerintahan. Partai politik harus memiliki tahapan – tahapan rekrutmen politik yang jelas dan berkualitas bagi kadernya. Dalam proses rekrutmen politik inilah partai politik harus menunjukkan kemampuannya dalam berdemokrasi di kalangan internal partai. Jika secara internal saja partai politik tidak mampu mencontohkan proses demokrasi yang baik dan benar, tentu akan sangat berpengaruh nantinya ketika partai tersebut terjun dalam proses berdemokrasi secara luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Komunikasi Politik

Partai politik membutuhkan komunikasi politik yang baik guna memberikan isu, gagasan, konsep serta program-program partai sehingga rakyat dapat mengetahui berbagai macam ide partai politik tersebut. Setiap anggota partai politik memiliki peran dalam melakukan komunikasi politik kepada masyarakat umum. Komunikasi politik dapat dilakukan dengan berbagai

cara, baik itu lewat media cetak, elektronik, maupun media daring atau *digital* yang tersedia secara legal (Wicaksono, 2017).

Selain itu, dijelaskan pula fungsi partai politik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002. Yakni Partai Politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota-anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
4. Partisipasi politik warga Negara
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraangender.

Partai politik dalam sistem politik demokrasi secara garis besar memiliki tiga kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi pemilihan calon, proses kampanye, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Jika fungsi pemerintahan telah diperoleh, partai politik juga bertindak sebagai pembuat kebijakan. Oleh karena itu, peran partai politik dalam demokrasi merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya. Hal ini berguna untuk menjalankan dan mengontrol pemerintahan dengan lebih baik.

Output dari berbagai macam peran partai politik di atas adalah perumusan dan pembuatan kebijakan publik guna mengakomodir kepentingan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pemikiran yang tidak pragmatis cenderung memilih partai politik yang mampu memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan sebagai respon dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Apabila partai politik tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya, maka kemungkinan besar masyarakat yang memiliki pemikiran yang rasional akan meninggalkan partai tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya partai politik meningkatkan metode yang rasional dalam usahanya mempengaruhi masyarakat (Wicaksono, 2017).

B. Teori *Party-Identification*

Party-ID atau Identifikasi Partai Politik adalah hubungan yang stabil antara pemilih dan partai politik tertentu, serta membuat pemilihnya tidak terpengaruh oleh faktor jangka pendek dalam menentukan pilihan politiknya. *Party-ID* merupakan faktor psikologis yang berkontribusi terhadap stabilitas dukungan partai politik. Identitas partai politik berada pada tataran sikap atau orientasi (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2019). Konsep ini pada awalnya muncul di Amerika Serikat karena di Negara tersebut menggunakan sistem dwipartai, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik. Apabila Seseorang mengidentifikasi dirinya cenderung lebih dekat kepada Partai Demokrat, maka orang tersebut hampir dapat dipastikan akan mendukung siapapun calon presiden yang berasal dari partai demokrat. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang cenderung dekat dengan kaum republikan, maka tentunya akan memberikan dukungan terhadap calon yang diusung dari partai republik.

Teori *Party-ID* berlandaskan pada konsep sikap dan sosialisasi. Sikap dari seseorang berpengaruh terhadap perilaku politiknya. Sikap tersebut muncul setelah melalui proses yang cukup lama, bahkan sejak berusia dini. Orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam mempengaruhi sikap politik seseorang sejak kecil, baik melalui komunikasi langsung ataupun

pandangan politik yang dimiliki oleh orang tua tersebut (Nursal, 2004). *Party-Identification* memberikan pengaruh yang kuat terhadap sikap politik individu yang berbeda. Identifikasi pribadi partai politik dapat diarahkan ke arah positif atau negatif. Identifikasi positif dengan suatu partai mirip dengan identifikasi diri dengan agama tertentu. Sedangkan Individu dengan identifikasi negatif, akan memberikan tanggapan bahwa mereka tidak berafiliasi dengan partai politik (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2019).

Konsep *party-identification* mengacu pada kedekatan psikologis individu dengan partai politik tertentu. Dalam konteks ini, akan terbagi menjadi beberapa kategori, yakni orang yang memiliki identifikasi kuat, lemah, ataupun netral. Konsep ini juga menjelaskan bahwa pemilih cenderung konsisten memilih salah satu partai politik, sehingga di setiap pemilu, pemilih akan memberikan dukungannya kepada partai yang sama. Dalam teori perilaku pemilih, konsep *party-ID* ini adalah bagian yang cukup penting jika menggunakan pendekatan psikologis. Konsep identifikasi yang dikutip oleh Mujani dari Campbell dalam hal ini adalah arah kasih sayang seorang individu terhadap suatu kelompok masyarakat yang penting. *Party-identification* diyakini mampu memberikan dampak yang kuat terhadap sikap politik masyarakat (Mujani, Liddle, dan Ambardi, 2019).

Realita yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa masih sedikit masyarakat yang mengasosiasikan dirinya dengan partai politik. Padahal kedekatan Partai Politik dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi suatu negara. Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, menunjukkan bahwa *party-ID* masyarakat Indonesia hanya sebesar 11,6 persen. Hal yang serupa ditunjukkan oleh survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan angka yang lebih rendah, yakni hanya 9,8 persen. Dari dua survei di atas, maka sebagian besar masyarakat Indonesia dengan persentasi lebih dari 85 persen merasa tidak memiliki asosiasi ataupun teridentifikasi dengan partai politik tertentu, atau bisa disebut sebagai *floating mass* (Dwi, 2018).

Rendahnya tingkat *party-ID* tersebut tentunya bukan suatu hal yang terjadi secara instan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakberhasilan partai politik dalam melakukan identifikasi serta dinilai masih belum optimal dalam melaksanakan fungsi politiknya. Kegagalan partai politik dalam melakukan identifikasi mengacu pada dua hal. Pertama, partai politik gagal menunjukkan orientasi ideologis serta diferensiasinya terhadap partai politik yang lain. Para pemilih tidak dapat menemukan hal yang cukup mencolok dari tiap-tiap partai, kecuali tanda gambar dan warna. Sehingga pemilih tidak memiliki sebuah alasan yang cukup kuat untuk memilih partai tersebut, apalagi hingga memiliki kedekatan dengan partai tersebut secara intens. Kedua, partai politik gagal dalam menciptakan sebuah pengorganisasian partai politik secara modern, mulai dari hal yang fundamental dalam menata organisasi, mendemokratiskan setiap pengambilan kebijakan, sosialisasi dan kampanye politik, hingga mobilisasi massa (Irahad dkk, 2019).

Fakta dilapangan justru menunjukkan bahwa partai politik justru semakin terpersonalisasi. Partai politik seolah hanya milik pribadi ataupun segelintir kelompok saja. Relasi yang terjalin antara elit partai dan massa cenderung bergaya feodal, memiliki kemiripan dengan relasi raja dan hamba di masa lampau dan beberapa pengambilan keputusannya dinilai kurang demokratis. Sementara, jika menilik pada aspek fungsional, partai politik gagal sebagai instrumen politik yang berfungsi memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mulai dari memperjuangkan aspirasi dan cita-cita politik masyarakat, melaksanakan pendidikan politik secara optimal dan berkelanjutan, hingga mencetak kader-kader politik yang berkualitas serta memiliki kompetensi yang mumpuni guna mengisi jabatan politik baik di legislatif dan eksekutif (Rudi, 2021).

Seringkali partai politik hanya turun ke masyarakat ketika sudah memasuki musim pemilu. Namun setelah berhasil mendapatkan kekuasaan, partai politik cenderung abai terhadap berbagai aspirasi dan masukan dari

konstituennya. Selain itu, kader partai politik yang memiliki jabatan politik, cukup banyak yang terseret kasus korupsi. Pejabat yang seharusnya menjadi petugas politik yang bertugas memperjuangkan cita-cita politik partai, namun realitanya justru menjadi corong partai yang mengalirkan uang negara kepada partai politik. Tentu hal ini merusak kepercayaan masyarakat dan menggerus tingkat *party-ID* (Burhanuddin, 2013).

Semakin menurunnya *party-ID* memunculkan berbagai dampak langsung di masyarakat, yakni :

1. Partisipasi elektoral masyarakat tidak menunjukkan kenaikan. Dalam beberapa pemilu terakhir, partisipasi elektoral justru mengalami penurunan, dimulai sejak Pemilu tahun 1999 dengan partisipasi sebesar 93,3%, kemudian pada tahun 2014 menurun menjadi 84,9%, serta pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan sehingga angka partisipasinya sebesar 70,9% saja masyarakat masih berpartisipasi pada pemilu legislatif. Hal ini terjadi karena masyarakat yang memiliki tingkat *party-ID* yang rendah cenderung tidak menggunakan hak suaranya karena tidak merasa terwakilkan oleh kehadiran partai politik tersebut.
2. Terjadi fluktuasi pada dukungan elektoral yang terjadi pada beberapa pemilu terakhir. Kontestasi pemilu seringkali memunculkan pemenang yang berbeda, seperti pemilu tahun 1999 yang dimenangkan PDI Perjuangan, kemudian Partai Golkar menjadi pemenang pada pemilu 2004, Partai Demokrat pada tahun 2009, hingga PDI Perjuangan pada tahun 2014 dan 2019. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap partai politik cenderung mengalami kenaikan dan penurunan.
3. Munculnya fenomena *split-ticket voting* juga terjadi akibat tingkat *party-ID* yang rendah. Fenomena ini terjadi ditandai dengan tidak linearnya antara dukungan konstituen dengan instruksi yang diberikan oleh elit partai untuk mendukung calon

pejabat yang diajukan dan diusung oleh partai pemilih tersebut. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam pemilu baik itu tingkat daerah ataupun nasional, masih banyak konstituen partai yang justru mendukung kandidat calon yang tidak didukung oleh partainya sendiri.

4. Proses politik elektoral akan cenderung bergerak menuju *candidate-centered politics*. Politik elektoral akan bergantung pada sosok figur atau ketokohan tertentu sehingga menyebabkan peningkatan *political cost* guna menunjang keperluan mulai dari strategi pemasaran politik, kampanye melalui berbagai kanal media, hingga aktivitas lainnya guna meningkatkan elektabilitas tokoh tersebut.
5. Terjadi peningkatan praktik *vote buying* yang cukup massif di masyarakat. *Vote buying* atau praktik jual beli suara ini memiliki korelasi yang kuat, baik dengan rendahnya kedekatan pemilih terhadap partai maupun buruknya evaluasi pemilih terhadap kinerja partai. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat *party-ID* pemilih maka semakin kecil sikap penerimaannya terhadap praktik politik uang (Burhanuddin, 2013).

Permasalahan ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus untuk kemudian diberikan solusi yang konkrit agar dampak yang dihasilkan dari rendahnya *party-ID* tidak semakin kuat yang berimbas pada menurunnya indeks demokrasi di Indonesia.

Maka dengan menggunakan teori di atas, peneliti akan mencari fakta-fakta di lapangan dengan melakukan observasi dan mengumpulkan data yang ada serta mengolah menjadi kalimat yang deskriptif tentang bagaimana Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal dalam mengembangkan *party-identification* sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang ada.

BAB III

PROFIL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TEGAL

A. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera yang awal kemunculannya masih memiliki nama Partai Keadilan merupakan partai politik yang mempunyai landasan Islam dimana proses berdirinya partai ini cukup memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dakwah Islam. Pada awalnya, partai ini juga mempunyai tujuan menjunjung tinggi perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia.

Partai ini terbentuk pada 9 Agustus 1998 dan menjadikan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta sebagai tempat peresmian Partai Keadilan (PK). Suasana religius yang cukup kental, *khidmad*, sederhana serta jauh dari kesan mewah seperti layaknya deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh sebuah partai baru. Pelaksanaan deklarasi ini bertempat di masjid karena memiliki sebuah tujuan utama yakni dengan menjadikan kampus sebagai sarana dakwah Islam yang dikembangkan secara sistematis oleh pemuda Islam yang dijadikan sebagai ujung tombak generasi perubahan.

Secara fungsionaris, partai ini memiliki pendapat bahwa dengan arah gerakan yang baru, keinginan bahwa politik umat mampu diimplementasikan dan kepentingan dakwah umat Islam bisa dimaksimalkan. Selain itu, partai politik ini terbentuk sebagai wadah bagi kaum pemuda yang memiliki rasa kurang percaya kepada berbagai institusi politik di Indonesia. Sehingga tidak heran jika kader dan anggota partai ini didominasi dari kalangan muda. Pendirian partai ini memiliki tujuan kepada perubahan umat, sehingga nantinya umat Islam mampu mencapai sasaran dakwah Islam dengan metode-metode yang demokratis dan mampu diterima oleh banyak orang serta

tidak memunculkan problematika di masyarakat. Gerakan dakwah yang diinisiasi oleh Partai Keadilanpun dikenal semakin luas oleh masyarakat dan gerakan ini semakin besar karena partai ini menyatakan bahwa Partai Keadilan adalah partai dakwah yang berasaskan Islam yang tentunya mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan (amar ma'ruf nahi munkar) (Dhakidae, 2004).

Partai ini memberikan tindakan-tindakan konkrit melalui pembangunan keislaman kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bentuknya cukup bervariasi dan beragam, diantaranya tabligh akbar, bakti sosial di masyarakat, kontribusi dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Ketika gerakan reformasi mulai digencarkan secara massif di negara ini, begitu banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah sistem politik di Indonesia. Kesempatan ini tentunya tidak disia-siakan oleh aktivis-aktivis ini, sehingga pada akhirnya berdirilah Partai Keadilan Sejahtera.

Berbagai macam cara telah dilakukan kader Partai Keadilan Sejahtera sebagai wujud pembuktian bahwa mereka cukup serius dalam bekerja guna menciptakan perbaikan umat menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusunlah beragam agenda yang telah dibuat bersama-sama dalam berbagai bidang.

Pada awalnya, nuansa Islam yang begitu kental dalam partai ini memunculkan pandangan yang tidak terlalu baik di masyarakat, terutama masyarakat yang telah menganggap bahwa partai ini mengusung semangat fundamentalis dan eksklusivisme. Namun, pendapat itu mampu dipatahkan oleh fakta bahwa semua anggota Partai ini bukan hanya umat muslim saja, melainkan ada juga masyarakat yang menganut agama lain seperti Buddha dan Kristen. Karakter yang telah dibangun dari awal berupa jiwa profesionalisme yang tinggi dan diirngi dengan jiwa patriotik dan moral yang bersih adalah komitmen dari partai ini. Dengan jiwa patriotik serta moral yang bersih diharapkan kedepannya mampu membentuk sikap dan

arah partai tetap pada koridor yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan ataupun mengalami perubahan dari tujuan yang akan dicapai. Sikap profesionalisme yang dikembangkan secara positif berciri kepada kemampuan menguasai materi secara utuh, memiliki sikap kritis terhadap realita di masyarakat serta kepekaan yang tinggi menjadi nilai tambah tinggi. Selain itu, Partai ini juga memiliki karakteristik lain, yakni, moderat, demokrat, reformis, independen demokratis, independen, reformis, dan moderat.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai representasi idealisme pemuda Islam terus melakukan upaya penawaran sebuah model partai modern namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai keIslaman. Sebuah partai yang dengan kuat berpedoman bahwa menciptakan bangsa Indonesia yang diridhoi oleh Allah SWT jauh lebih penting daripada hanya sekedar berpartisipasi dalam kontestasi politik elektoral, baik itu menang, ataupun kalah, sehingga partai tidak akan bubar jika nantinya tujuan elektoral tersebut tidak tercapai.

Partai Keadilan Sejahtera secara mengejutkan mampu meraih jumlah suara yang bisa dikatakan tidak sedikit, padahal partai ini merupakan partai baru, belum memiliki tokoh atau figur yang kuat seperti partai yang lain ataupun pengalaman politik yang mumpuni. Partai ini mampu bersaing secara sehat dengan partai besar yang kekuatannya jauh lebih besar. Perolehan suara yang diperoleh partai ini adalah 1,36% suara dari hasil keseluruhan jumlah suara. Namun aturan yang dilakukan oleh KPU yaitu ketentuan electoral threshold yakni batas sekurang-kurangnya 2% atau 10 kursi di DPR membuat Partai Keadilan tidak dapat menjadi peserta pemilu pada tahun 2004 (Dhakidae, 2004).

Dengan adanya ketentuan tersebut tidak membuat Partai Keadilan mundur dan patah semangat dalam berjuang. Partai Keadilan yang dari awal memiliki komitmen, komitmennya adalah mereka terbentuk tidak hanya sekedar untuk mengikuti pemilu yang ada di

Indonesia, yang paling utama yaitu perjuangan dakwah yang menjadi komitmen mereka. Memperbaiki umat menjadi lebih baik tidak akan memperhentikan perjuangan partai ini walaupun adanya ketentuan electoral threshold. Guna meningkatkan jaringan dakwah, diperlukan sebuah yang mampu melanjutkan perjuangan dakwah. Sehingga, pimpinan Partai Keadilan saat itu membuat kebijakan untuk membuat partai baru, yakni Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi kelanjutan perjalanan politik dari Partai Keadilan.

Partai baru ini dideklarasikan secara resmi pada 20 April 2003, dan memilih Lapangan monas sebagai tempat untuk melakukan deklarasi. Presiden Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan deklarasi secara langsung mengenai lahirnya partai baru ini sebagai kelanjutan dari Partai Keadilan. Sehingga, masyarakat yang sebelumnya tergabung sebagai kader Partai Keadilan secara langsung menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. Dengan pembaharuan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera, diharapkan setiap unsur partai mempunyai tekad yang kuat untuk menjadi peserta pemilu dan berupaya secara maksimal untuk melewati ambang batas suara atau *electoral threshold* (Dhakidae, 2004).

Partai Keadilan Sejahtera di dalam bidang perempuan mengambil peran yang sangat penting. Bidang kewanitaan membahas tentang aspek pembinaan keluarga sampai dengan kiprah mereka dalam menjadi anggota legislatif di DPR.

B. Nama dan Lambang Partai

Gambar 1 Logo PKS



Lambang Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertera pada Bab I Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, memiliki makna sebagai berikut:

1. bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila;
2. dua bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan, kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan semangat Proklamasi, adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;
4. warna putih melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia;
5. warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, kesiapsiagaan, pelayanan, dan semangat muda dalam kehidupan yang selalu optimis;
6. warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan;
7. PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.

C. Karakteristik Partai Keadilan Sejahtera

Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera yang tertulis pada dokumen resmi yang dibuat oleh pimpinan pusat partai. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Moralitas

Partai PKS yang mempunyai landasan Islam, moralitas diposisikan pada karakter yang pertama. Islam merupakan agama yang mempunyai pedoman hidup yang sempurna yang bisa mengatur berbagai aktivitas seluruh kehidupan manusia dari lahir sampai kembali kepada Sang Pencipta. Islam tidak hanya mengatur tentang beribadah namun juga mengatur banyak lingkup kehidupan seperti masalah politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial-budaya. Islam memberikan bimbingan dalam hal politik. Dalam politik setiap muslim harus mempunyai prinsip yang mengacu kepada etika dan norma yang telah ditetapkan. Landasan seorang muslim dalam politik yaitu berupa prinsip kebenaran, kejujuran serta amanah (Dhakidae, 2004).

2. Profesional

Dalam permasalahan yang dihadapi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya harus berdasarkan pada sikap yang profesional agar mengantarkan partai pada kebijakan yang tepat serta bertanggung jawab. Profesional itu terbentuk tidak bisa dilepaskan dari moral. Profesional tumbuh dan dikendalikan dari rasa tanggung jawab pribadi.

3. Patriotik

Untuk para kader PKS, hidup dalam lingkup politik merupakan jihad berpolitik. Jihad tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kader PKS guna memperjuangkan

dakwah Islam. Keyakinan tersebut telah diapahami dalam diri kader sehingga mereka mempunyai semangat untuk mensejahterakan partai.

4. Moderat

Sikap ini terbentuk secara alami dengan segala keseimbangan dan keadilan. Sebuah sikap yang alami yang dimana pemikiran dan pandangan sikap moderasi dapat terbentuk secara objektif. Sikap ini menggambarkan jalan yang menjadi ciri umat yang jauh dari sikap yang berlebih-lebihan.

5. Demokrat

PKS dengan terbuka menerima segala nilai-nilai yang bersifat universal dari demokrasi yang dimana bukan hanya nilai Islam saja yang diterima. Nilai demokrasi membuat masyarakat lebih bebas dalam menyampaikan aspirasinya untuk membentuk kepentingan bersama. Nilai demokrasi yang terbentuk dari pendapat masyarakat tentunya tidak akan bertentangan dengan nilai Islam. Penyelenggaraan negara disini berdasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah atau nilai-nilai syuro

6. Reformis

Sikap reformis yang dimiliki PKS menunjukkan bahwa partai ini merupakan partai reformis yang secara konsisten menghindari dirinya dari sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Hal ini terbentuk dari kualitas kader PKS yang menampilkan kepribadian Islam dalam segi kehidupan (syaksiyah). PKS mempunyai prinsip bahwa masalah politik sama-sama penting dengan pembinaan pribadi calon politikus. Dengan begitu, upaya kaderisasi menjadi aktivitas utama yang dilakukan secara mendalam. Dan tidak heran apabila partai PKS sering disebut partai kader.

7. Independen

Karakter independen yang ada di PKS seperti halnya yang telah dikemukakan oleh seorang panglima perang Islam. Riri' bin Amir dihadapan Rustum, “aku datang diutus untuk membebaskan manusia menuju penghambaan kepada Allah semesta, dari kesempitan dunia menuju keluasaan dunia-akhirat, dan dari tirani-tirani agama menuju keadilan Islam”. Dengan prinsip tersebut, kemerdekaan, keadilan dan kebebasan yang dicita-citakan oleh PKS tidak terbatas oleh perbedaan suku, ras, etnis, status dan sosial agama

D. Prinsip Partai Keadilan Sejahtera

Dalam melaksanakan aktivitas kepartaian, Partai Keadilan Sejahtera memiliki beberapa prinsip kebijakan yang dijadikan landasan dalam berpikir dan beraktivitas ketika mengelola partai. Prinsip-prinsip kebijakan Partai Keadilan Sejahtera secara khusus bersumber dari ajaran Islam yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an Prinsip tersebut diantaranya:

1. *Al-Syumuliyah* (Lengkap dan Integral)

Sesuai dengan karakteristik dakwah islami yang syamil, maka setiap kebijakan partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek memandangnya dari berbagai perspektif dan mensikronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

2. *Al-Ishlah* (Reformatif)

Setiap kebijakan, program dan langkah yang ditempuh partai selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintah dan Negara.

3. *Al-Syar'iyah* (Konstitusional)

Syariah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain.

4. *Al-Wasathiyah* (Moderat)

Dalam Al-Qur'an, masyarakat muslim dikatakan sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasatha*). Sehingga moralitas yang dimiliki oleh masyarakat Islam melahirkan sikap dan perilaku moderat ketika menghadapi berbagai persoalan di masyarakat. Implementasi sikap moderat ini, dalam ranah ditunjukkan dengan sikap penolakan terhadap berbagai bentuk ekstrimisme dan eksagritas pada sifat kezaliman dan kebathilan.

5. *Al-Istiqamah* (Komit dan Konsisten)

Seorang muslim wajib memiliki sikap komitmen dan konsisten pada ajaran Islam yang merupakan sumber inspirasi dalam setiap langkah yang diambil. Implementasinya adalah seluruh langkah partai baik itu pengambilan keputusan ataupun program-program partai harus konsisten dan sejalan pada "hukum transenden".

6. *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (Tumbuh dan Berkembang)

Sikap konsistensi yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera tentunya tidak boleh memunculkan stagnasi pada setiap gerakannya serta kehilangan orisinalitas dalam berkreasi. Sehingga, diperlukan prinsip yang mengharuskan partai ini untuk tumbuh dan berkembang dibarengi dengan tetap berpatokan pada kaidah keislaman.

7. *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Partai Keadilan Sejahtera dalam menumbuhkan dan mengembangkan gerakan dakwahnya harus dilaksanakan secara seimbang dan proporsional. Pengembangan ini harus bertahap

dan menyesuaikan dengan *sunnatullah* yang berlaku di jagat raya ini.

8. *Al-Awlawiyat wa Al-Maslahah* (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Sikap efektifitas harus dimiliki oleh sebuah gerakan. Karena dari efektifitas itu sendiri akan muncul kemampuan untuk menentukan skala prioritas langkah dan pengambilan kebijakan untuk gerakannya. Sehingga prinsip ini mampu memunculkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan sebuah gerakan.

9. *Al-Hulul* (Solusi)

Karakteristik ini menjelaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan berbagai aspek, bukan hanya cukup sebatas janji dan teori, namun diwujudkan dalam berbagai pengambilan kebijakan dan kegiatan yang berdampak secara langsung kepada masyarakat.

10. *Al-Mustaqbaliyah* (Orientasi Masa Depan)

Sasaran dakwah yang akan diwujudkan disadari oleh partai ini adalah sebuah sasaran yang sangat besar, yakni tegaknya agama Allah dan menebarkan serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh manusia, sehingga tentu saja hal ini bersifat jangka panjang dan memungkinkan generasi mendatang akan menikmati keberhasilan dari cita partai ini.

11. *Al-'Alamiyah* (Bagian dari Dakwah Sedunia)

Gerakan dakwah islamiyah hakikatnya baik dari segi tujuan maupun sasaran yang dituju memiliki sifat global atau mendunia sejalan dengan universitas Islam. Gerakan ini sejatinya adalah aktivitas yang tidak memiliki batas daerah atau negara tertentu.

E. Gambaran Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal sudah berdiri sejak 24 April 2004, atau saat ini sudah menginjak 18 tahun. Dalam Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) BAB XI Pasal 23, menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah.

Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

1. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah;
2. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah; dan
3. Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Daerah.

Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal, membawahi beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berada dalam wilayahnya. Dewan Pimpinan Cabang merupakan struktur kepengurusan partai yang ada pada tingkat kecamatan. Di Kabupaten Tegal, terdapat 18 Dewan Pimpinan Cabang yang di bawahnya menaungi Dewan Pimpinan Ranting (DPRa) pada tingkat desa atau kelurahan. Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal berdiri sejak tanggal 24 April 2004, atau saat ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tegal sudah berusia 7 tahun.

Berikut ini merupakan struktur Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Kabupaten Tegal periode 2020 – 2025 :

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah : Muhammad Yahya

Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah : Adi Wiratmoko

Ketua Dewan Pengurus Daerah : Arip Budianto

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah	: Ahsinudin
Bendahara Dewan Pengurus Daerah	: Mohamad Nuralim
Ketua Kaderisasi	: Musthofa
Ketua Dewan Etik Daerah	: Teguh Rusyanto
Sekretaris Dewan Etik Daerah	: Wigiyanto

F. Visi Misi

Dalam Bab II Pasal 6 & 7 Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, menjelaskan bahwa visi dari Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misi Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kemudian, guna mewujudkan visi dan misi tersebut, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal memiliki misi khusus yakni :

- 1) Melahirkan kader sebagai *anashir taghyir* atau pembeda sekaligus menyebarkan dakwah Islam.
- 2) Mengembangkan berbagai institusi kemasyarakatan yang bermanfaat di berbagai bidang.
- 3) Membangun pandangan bahwa implementasi ajaran Islam merupakan hal yang solutif dan membawa *rahmat* sehingga masyarakat bisa mendukung penerapan hal tersebut.
- 4) Meningkatkan kesadaran politik yang dimiliki masyarakat dengan melakukan pelayanan, advokasi, serta pemberdayaan hak kewarganegaraannya.
- 5) Mengimplementasikan *amar ma'ruf nahi munkar* pada kekuasaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan berdasarkan aspek hukum dan etika keislaman.

- 6) Berkomunikasi dan bersilaturahmi secara aktif dan menjalin sinergi dan islah (pertemuan) dengan berbagai lapisan umat Islam, karena partai ini beranggapan bahwa perlu ditetapkan kebijakan fundamental guna mengantisipasi dan mereduksi kemungkinan munculnya berbagai konflik ideologis di kalangan aktivis partai (Platform Kebijakan Pembangunan PKS, 2008:1).

Selanjutnya, dalam pasal 8 dan 9 dijelaskan pula mengenai tugas dan fungsi Partai Keadilan Sejahtera, yakni Tujuan Partai adalah:

- 1) memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 3) memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 4) turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan fungsi partai adalah :

- 1) menyelenggarakan pendidikan politik;
- 2) menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara;
- 3) memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik; dan
- 4) memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PENGEMBANGAN *PARTY-IDENTIFICATION* OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN TEGAL

A. Upaya Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan *Party-Identification* di Kabupaten Tegal

Dinamika yang terjadi di lingkup Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal cukup beragam. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan kedekatan dengan masyarakat yang muaranya adalah dukungan politik. Beberapa upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Partai yang Aspiratif

Salah satu indikator meningkatnya identifikasi partai politik (*Party-ID*) pada masyarakat yakni kemampuan partai politik sebagai corong advokasi dari berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Partai politik tentunya harus mampu menyerap aspirasi dari masyarakat. Aspirasi politik merupakan berbagai usulan yang diberikan oleh rakyat yang berkaitan dengan permasalahan politik. Biasanya aspirasi tersebut disalurkan melalui partai politik baik secara langsung ataupun secara perwakilan melalui DPR atau DPRD (Kaelola,2009:28).

Kehadiran partai politik sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat menjadi bukti bahwa kemampuan *politic behavior* di Indonesia telah mengalami perkembangan. Dinamika yang terjadi dari tahun ke tahun membuktikan bahwa Indonesia terus berproses untuk mencapai situasi demokrasi yang ideal. Meskipun tak ada yang bisa memprediksi rentang waktu yang akan ditempuh dalam perubahan tersebut. Namun setidaknya saat ini keberadaan partai politik dalam menyuarkan berbagai aspirasi rakyat cukup eksis meskipun dengan wujud yang beragam (Wicaksono, 2017).

Hal ini pula yang senantiasa dilakukan secara berkelanjutan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal. Hal ini dikemukakan secara langsung oleh Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal, Ahsinudin, S.Ip, beliau menjelaskan :

“Biasanya, segala usul ataupun masukan disampaikan secara berjenjang. Dari masyarakat menyampaikan melalui kader yang ada di wilayah tersebut, untuk kemudian disampaikan kepada pengurus ranting, kemudian diteruskan kepada pengurus cabang, lalu dilanjutkan ke DPD. Namun, apabila aduan atau permasalahan tersebut mampu diselesaikan di tingkat wilayah tersebut, maka cukup ditingkat itu saja. Jadi tergantung pada bobot permasalahan. Untuk advokasi, biasanya langsung disampaikan kepada perwakilan anggota dewan. Jadi ada beberapa opsi yang bisa dipilih oleh masyarakat” (Ahsinudin, Wawancara pada 8 Juni 2022)

Dari pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal ingin menunjukkan eksistensi dan kedekatan pada masyarakat dengan menjadikan setiap anggota partai sebagai wadah aspirasi dari masyarakat serta mengoptimalkan anggotanya yang saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Tegal. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal, Arip Budiono, S.Ip. Beliau mengatakan :

“Anggota kita senantiasa terbuka kapanpun untuk menerima baik itu aspirasi ataupun aduan dari masyarakat. Karena memang sudah dari dulu PKS ada untuk melayani masyarakat. Bahkan walaupun ada saran atau kritik kepada PKS, tentu kita terima sebagai auto kritik dan evaluasi ke depan” (Budiono, wawancara pada 8 Juni 2022)

Kondisi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal bisa dikatakan belum terlalu lama bila dibandingkan dengan partai lain, sehingga memerlukan keaktifan yang tinggi dari anggotanya. Sehingga hal ini pula yang mendorong Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal untuk senantiasa aktif mendengarkan aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal juga cukup sering mendapatkan aduan dari masyarakat terkait dengan berbagai problematika yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal :

“Kita menerima cukup banyak aspirasi atau aduan dari masyarakat. Biasanya terkait dengan permasalahan pedagang pasar, kesehatan, BPJS, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Sementara ini yang memang sedang hangat yakni permasalahan tenaga honorer di sekolah-sekolah yang akan dihapus. Mereka menginginkan audiensi dan menanyakan tentang nasib mereka karena sudah mengabdikan dengan waktu yang cukup lama tetapi justru tidak diperhatikan. Jadi biasanya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal memfasilitasi audiensi dengan masyarakat untuk kemudian hasil dari audiensi tersebut dibahas di rapat anggota dewan untuk mendapatkan *follow-up*” (Budiono, wawancara pada 8 Juni 2022)

Gambar 2 Kegiatan Reses Anggota DPRD PKS Kab Tegal



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Kader PKS Kabupaten Tegal yang menjadi anggota DPRD juga rutin menyerap aspirasi masyarakat terutama ketika masa reses. Karena memang sejatinya masa reses bukan hanya waktu 'istirahat', akan tetapi masa setiap anggota dewan turun ke daerah pemilihannya untuk mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.

Memang idealnya, kolaborasi yang kuat dari rakyat dan partai politik sangatlah dibutuhkan. Eksistensi dari partai politik seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai ruang dan sarana bagi rakyat. Terlebih jika melihat fakta di lapangan bahwa jumlah partai politik cukup banyak, maka seharusnya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan usulan menjadi kian mudah. Politik sejatinya merupakan usaha yang dilakukan oleh warga negara guna menciptakan kemanfaatan bersama sehingga muncul berbagai partai yang bisa dijadikan acuan dalam membuat kebijakan. Setiap kebijakan tersebut harus linear dengan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, faktanya sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya untuk mengambil sikap yang sama dengan partai politik. Hal ini diakibatkan oleh oknum partai politik yang abai terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Beberapa tahapan awal yang bisa dilakukan guna menciptakan persepsi positif dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaannya adalah dengan memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal saat ini.

Selain itu, sampai saat ini tercatat belum ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal maupun anggota dewan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal. Hal ini juga tercipta

sebagai wujud menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memberikan suaranya pada saat pemilihan umum.

2. Pendekatan Kepada Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal bukan hanya dalam lingkup hal-hal yang bersifat kelegislatifan saja, akan tetapi melalui beberapa program.

“Tentu kita memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara rutin seperti beberapa kegiatan pelatihan, perlombaan, dan olahraga bersama. Jadi kita melaksanakan kegiatan bukan hanya saat mendekati pemilu saja, agar Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal semakin dekat kepada masyarakat” (Budiono, Wawancara pada 8 Juni 2022)

Berikut ini merupakan pendekatan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu :

a) Pelatihan Hidroponik

Gambar 3 Kegiatan Pelatihan Hidroponik



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Pada tanggal 10 April 2021, DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal bekerja sama dengan Mejasem Hidroponic Center (MHC) mengadakan pelatihan hidroponik, yakni metode bercocok tanam menggunakan

media air. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan kepada masyarakat khususnya para ibu guna meningkatkan produktivitasnya.

b) Pendampingan Intensif Kader Berdaya (Pengin Kaya)

Gambar 4 Kegiatan "Pengin Kaya"



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

DPD Partai Keadilan Sejahtera mengadakan program pendampingan bisnis dengan nama Pendampingan Intensif Kader Berdaya (Pengin Kaya) yang akan dilaksanakan secara rutin selama satu tahun. Kegiatan ini menasar pada pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Tegal tanpa dipungut biaya sama sekali. Kegiatan ini nantinya akan dipimpin oleh *coach* bersertifikasi sebagai pendamping UMKM.

c) Rumah Keluarga Indonesia (RKI)

Gambar 5 Kegiatan Pelatihan Konselor RKI



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Partai Keadilan Sejahtera memiliki program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, yakni Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Program ini bertujuan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi problematika yang ada di lingkungan keluarga. Pada 27 Februari 2022, para konselor RKI Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal telah diberikan pelatihan sehingga harapannya mampu menangani berbagai permasalahan keluarga.

d) Senam Bersama Masyarakat

Gambar 6 Kegiatan Senam Bersama Masyarakat



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Selain itu, program-program yang mulai dilaksanakan secara rutin adalah kegiatan olahraga bersama dengan masyarakat sekitar. Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal mulai secara kontinyu mengadakan kegiatan senam bersama masyarakat, yang dilaksanakan baik di lapangan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal maupun di tingkat kecamatan. Kegiatan ini dibuat selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani, juga sekaligus sarana untuk bersilaturahmi setelah menjalani rutinitas harian, karena umumnya kegiatan ini diselenggarakan pada hari minggu. Sehingga masyarakat umum bisa dengan mudah bergabung dengan kegiatan ini.

e) Tanggap Bencana

Gambar 7 Penyerahan Bantuan kepada Korban Banjir Warureja



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Gambar 8 Penerjunan Perahu Karet untuk Distribusi Logistik



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Partai Keadilan Sejahtera memang cukup dikenal sebagai salah satu partai yang cukup aktif terjun ketika terjadi bencana di masyarakat. Partai ini berkomitmen kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam, termasuk di wilayah Kabupaten Tegal yang pernah dilanda bencana. DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal juga sering melakukan aksi tanggap bencana, seperti ketika terjadi bencana banjir di Kecamatan Warureja dan Suradadi pada 23 November 2021.

f) Jum'at Berkah

Gambar 9 Kegiatan Jum'at Berkah



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

PKS Kabupaten Tegal rutin mengadakan kegiatan Jum'at Berkah dengan membagikan beberapa paket makanan. Hari Jum'at merupakan hari raya mingguan bagi umat Islam, sehingga PKS Kabupaten Tegal memilih hari Jum'at sebagai momentum yang cukup tepat untuk melakukan kegiatan yang positif ini sekaligus bentuk rasa syukur kepada Allah. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jum'at dan berpindah dari satu titik ke titik lainnya.

g) Bakti Sosial

Gambar 10 Kegiatan Bakti Sosial di Suradadi



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Program lain berkaitan dengan kemanusiaan yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah bakti sosial. Kegiatan ini selain bentuk kepedulian terhadap masyarakat, juga sebagai pendekatan Partai kepada masyarakat sehingga partai ini semakin dikenal oleh masyarakat dan dirasakan dampaknya secara langsung, bukan hanya ketika masa kampanye. Seperti gambar di atas, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal mengadakan kegiatan bakti sosial di Desa Gembong, Suradadi, Kabupaten Tegal pada 25 April 2022. Dalam kegiatan ini, dibagikan paket sembako kepada kaum dhuafa. Kegiatan Bakti Sosial ini juga merupakan program rutin dari Partai Keadilan Sejahtera guna membantu masyarakat yang membutuhkan.

h) Sekolah Orang Tua

Gambar 11 Kegiatan Sekolah Orang Tua



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

DPD Partai Keadilan Sejahtera memiliki program rutin bulanan, yakni Sekolah Orang Tua (SOT). Program ini memiliki sasaran pada para orang tua maupun pemuda yang akan menjadi orang tua. Berbagai materi pelatihan diberikan guna menunjang kehidupan berkeluarga agar yang lebih harmonis.

Berbagai program yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal tentunya merupakan salah satu

upaya untuk mendekati diri kepada masyarakat sekaligus implementasi dari jargon “berkhidmat untuk rakyat”. Menariknya, program yang dibuat secara perhitungan matematis cukup jauh dari masa pemilihan, baik itu untuk pemilu tingkat daerah maupun pemilu tingkat pusat. Hal ini menandakan konsistensi Partai Keadilan Sejahtera dalam upaya meningkatkan *party-identification* di wilayah Kabupaten Tegal. Kegiatan yang diselenggarakanpun sebagian besar bersifat meningkatkan keterampilan dan produktifitas dari masyarakat, sehingga bukan semata-mata kegiatan yang bersifat politis dan jangka pendek.

3. Optimalisasi Pembinaan Anggota

Selain program untuk masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal tentu memiliki program untuk membina para anggotanya agar semakin solid dan teguh dalam mendukung setiap program Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu metode yang dilakukan adalah dengan metode tarbiyah yakni pengajian dengan skala kecil atau yang dikenal dengan istilah *liqo*.

Liqo merupakan pengajian yang umumnya terdiri dari beberapa orang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, yakni 3 sampai dengan 12 orang. Jumlah ini dibatasi supaya peserta *liqo* mampu menyerap materi dakwah secara optimal dan memupuk rasa kekeluargaan antar anggotanya. Kegiatan ini dipimpin oleh guru yang biasa disebut sebagai *Murobbi*. Beberapa anggota Partai dikelompokkan berdasarkan usia, domisili, profesi, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Sehingga jamaah laki-laki akan dipimpin oleh *Murobbi* laki-laki, begitu juga perempuan yang akan dipimpin oleh *Murobbi* perempuan (*Murobbiah*).

Kegiatan ini biasanya diisi dengan *tilawah* dan *tadabbur* Al-Qur'an, *muroja'ah* hafalan baik itu Al-Qur'an maupun hadits, kultum, membedah buku-buku islami, *qodhoya* serta *rawa'i*, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dakwah dari *Murobbi* atau *Murobbiah*.

Materi yang disampaikan oleh *Murobbi* atau *Murobbiah* adalah seputar tauhid, fikih, akhlakul karimah, muamalah, serta tentu saja pembahasan mengenai perkembangan politik, sosial dan budaya yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Lewat kegiatan *liqo*, Partai Keadilan Sejahtera menanamkan tentang visi misi untuk menciptakan masyarakat madani, adil serta mewujudkan cita-cita sejahtera.

Selain dalam bentuk pengajian, terkadang kegiatan pembinaan anggota ini diselingi dengan *riyadhoh* atau berolahraga bersama, *rihlah* atau rekreasi ke suatu tempat untuk *tafakkur alam* bersama-sama, atau kegiatan lainnya seperti *sharing* keahlian antar anggota.

Mayoritas program pembinaan memang kebanyakan menggunakan metode pengajian. Namun, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal tetap membuka diri bagi siapapun yang ingin bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera.

“Secara umum kita terbuka kepada siapapun yang ingin bergabung dengan PKS, sesuai amanat dari Ketua Majelis Syura’. Tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan kita yang non-muslim untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera, karena sejatinya Partai Keadilan Sejahtera merupakan wadah bagi siapapun yang ingin berkhidmat kepada masyarakat”
(Ahsinudin, wawancara pada 8 Juni 2022)

Pada hakikatnya, siapapun bisa untuk bergabung menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera. Bagi masyarakat non-muslim yang ingin menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera karena ketertarikan terhadap program-program partai, Partai Keadilan Sejahtera siap menerima dengan tangan terbuka, karena sejatinya partai ini tidak memfilter anggota berdasarkan jenis agama, meskipun secara umum anggota Partai Keadilan Sejahtera berbasis Islam.

Selain dari program yang bersifat keagamaan, Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki program-program lain guna meningkatkan kualitas para anggota adalah Pendidikan Kader dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota. Partai Politik tentu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi anggotanya agar kemudian para anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal mampu berdaya guna secara maksimal dan mampu memberikan manfaat untuk kepinginan masyarakat.

Gambar 12 Kegiatan Pendidikan Kader dan Peningkatan Kualitas Amggota



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Harapannya, semakin besar manfaat yang diberikan anggota, maka semakin kuat pula ikatan psikologis dengan

masyarakat sehingga nantinya terbentuk identifikasi partai politik yang positif.

4. Mempertahankan Kualitas Anggota Dewan

Dalam pelaksanaan pemilu, Partai Keadilan Sejahtera memiliki strategi yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, yakni tidak memilih dan memanfaatkan figur artis sebagai calon anggota legislatif. Partai ini cenderung memilih para caleg yang dipilih melalui dua cara, yakni dari internal anggota Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri, serta dengan merekrut tokoh masyarakat. Langkah ini ditempuh karena Partai Keadilan Sejahtera beranggapan bahwa alangkah baiknya apabila calon anggota legislatif yang diajukan merupakan anggota internal partai, sehingga ini menjadi salah satu indikator bahwa pembinaan yang ada di dalam tubuh partai bisa dikatakan berhasil.

Selain itu, dalam merekrut tokoh masyarakatpun tidak sembarangan, tentunya kapasitas yang dimiliki wajib melebihi kapasitas dari kader Partai Keadilan Sejahtera, karena apabila ada tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas lebih baik dari kader internal partai, maka tokoh tersebut tentunya memiliki kelayakan untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (Erna dan Ridho, 2020).

Strategi yang ditempuh dengan menempatkan kader internal partai untuk maju menjadi caleg tersebut tentu memiliki maksud tersendiri, salah satunya adalah untuk meminimalisir kemungkinan anggota parlemen Partai Keadilan Sejahtera yang terlibat kasus korupsi.

Korupsi memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Seperti penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi

akan menyebabkan penurunan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Sedangkan pada skala yang makro, penyimpangan dana publik yang dimanfaatkan oleh oknum individu telah menurunkan kemanfaatan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dalam berbagai lingkup, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, tindakan korupsi juga akan semakin mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berdampak pada elektabilitas yang menurun serta hubungan kedekatan antara masyarakat dan partai politik semakin menjauh.

Selain itu, korupsi juga berdampak pada beberapa hal berikut, yakni :

1. Runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa.
2. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
3. Korupsi memberi kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat.
4. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.
5. Memiliki dampak sosial dengan merosotnya human capital (Salma, 2010).

Korupsi tentunya memberikan dampak yang sangat negatif pada proses demokratisasi sebuah negara, karena tindakan korupsi mampu mendelegitimasi dan mereduksi kepercayaan publik terhadap sebuah proses politik. Tindakan korupsi juga mampu mendistorsi pengambilan kebijakan publik, menghilangkan nilai akuntabilitas publik serta mengabaikan *rule of the law*. Selain itu, korupsi juga mengakibatkan berbagai

pembangunan dan fasilitas umum memiliki kualitas yang cukup buruk dan tidak sesuai yang diharapkan pada proses perencanaan, sehingga secara umum dapat menghambat laju pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Tindakan-tindakan buruk semacam ini dihindari oleh PKS, dengan memberikan kesempatan kepada kader hasil binaan internal partai untuk maju dan berkontestasi dalam pemilihan anggota legislatif. Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan tindakan koruptif yang bisa dilakukan oleh anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Hal ini selaras dengan data anggota partai politik yang menjabat sebagai anggota legislatif dan terlibat kasus korupsi selama periode tahun 2014 – 2019. Berdasarkan yang dihimpun dari ICW (Indonesia Corruption Watch), terdapat 23 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014-2019. Dari jumlah tersebut, hanya ada 1 orang yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini tentu menjadi gambaran bagaimana binaan dan arahan yang diterima selama menjadi anggota partai mampu dipertanggungjawabkan dengan baik ketika menjabat sebagai anggota dewan (Erna dan Ridho, 2020).

Berdasarkan fakta di atas, kecenderungan Partai Keadilan Sejahtera untuk memilih anggota internalnya sendiri dibandingkan figur artis dalam pemilu merupakan salah satu strategi yang positif. Hal ini menjadi pembuktian bahwa Partai Keadilan Sejahtera selalu berusaha meningkatkan kapasitas yang dimiliki anggota sehingga menjadikan anggota partai tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni.

B. Tantangan Saat Mengembangkan *Party-Identification*

Upaya meningkatkan ikatan kedekatan partai dengan masyarakat tentu menghadapi berbagai tantangan. Baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam prosesnya, memang tidak mudah karena Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang sedang membuka diri dari partai eksklusif menuju ke arah inklusif. Tantangan yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut

1. Isu Negatif dari Eksternal Partai

Partai Keadilan Sejahtera sejak awal berdiri memang terkenal sebagai Partai Dakwah karena berasal dari gerakan dakwah yang ada di kampus-kampus. Lebih jauh lagi, Partai Keadilan Sejahtera seringkali dianggap memiliki mazhab fiqih tersendiri. Belum lagi tuduhan-tuduhan seperti isu wahabi, radikal, atau bahkan mengubah bentuk Negara Indonesia menjadi khilafah.

Memang, cita-cita Partai Keadilan Sejahtera untuk menegakkan khilafah Islamiyyah tidak kemudian menjadikan partai ini melakukan berbagai macam cara guna mencapai tujuan tersebut. Partai ini mengimplementasikan lewat cara-cara yang kontekstual dalam menuangkan pemikiran - pemikiran politiknya menyesuaikan diri dengan konteks keindonesiaan yang plural. Pancasila dan UUD 1945 merupakan *hablumminannas* yang tidak bertolak belakang dengan *hablumminallah*, yakni Al-Qur'an. Hal-hal yang berkaitan dengan asas Partai Keadilan Sejahtera secara umum merujuk dan mengembalikan semua pendapatnya tentang pemikiran dan teori politik PKS kepada Alquran (Titin, 2019).

Khilafah Islamiyah merupakan tujuan dari politik Partai Keadilan Sejahtera. Fakta tersebut tidak bisa disangkal. Namun, dalam memahami tentang *Khilafah Islamiyah*, Partai Keadilan Sejahtera memiliki perbedaan pandangan dengan harokah lain.

Bahkan, ada semacam phobia dengan istilah *Khilafah Islamiyah*. Hal itu diakibatkan oleh opini yang dihembuskan oleh Barat. Harus diingat bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai politik yang berdiri di Indonesia, maka pemikirannya pun tentu lebih mengarah kepada keindonesiaan. *Khilafah* dipahami oleh Partai ini lebih kepada nilai-nilai seperti: kemanusiaan internasional, keadilan internasional, kesetaraan internasional, penegakkan hukum internasional.

Sikap Partai Keadilan Sejahtera terhadap Pancasila di mata Partai Keadilan Sejahtera merupakan sebuah konsep bernegara yang sudah final. Sehingga sama sekali tidak ada keinginan dari partai ini untuk mengubah Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila memang sudah bersesuaian dengan nilai keislaman karena sejatinya, pencetus Pancasila dahulu kalaupun terdapat pengaruh dan kontribusi para ulama. Partai ini menilai bahwa Pancasila juga mengambil dari Al-Qur'an. Namun, guna mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia yang heterogen dan pluralis serta Indonesia bukan Negara Islam, maka detail dari redaksinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sejatinya, apabila isi dari Pancasila dilaksanakan secara sebaik-baiknya oleh masyarakat, maka secara tidak langsung itu merupakan bagian dari terwujudnya *Khilafah Islamiyah* yang disesuaikan dengan demografi Indonesia.

“Realita di lapangan memang masih banyak yang menganggap bahwa PKS ini radikal, wahabi, khilafah, dan lain sebagainya. Padahal justru di PKS banyak anggota dari berbagai kalangan, baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun kalangan nasionalis” (Ahsinudin, wawancara pada 8 Juni 2022)

Tentu tidak mudah dalam menghadapi isu-isu khususnya yang bersifat negatif dari eksternal. Terlebih di era media sosial

seperti saat ini membuat berbagai macam isu bisa diproduksi oleh siapa pun entah dengan maksud positif maupun negatif. Hal ini yang bisa dijadikan senjata ampuh guna menyerang lawan politik dan tentu sangat berakibat buruk bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

“Memang untuk anggota-anggota PKS tidak terlalu terpengaruh oleh isu dari eksternal, akan tetapi masyarakat yang masih dalam kategori *swing voters* inilah yang cukup sering terpengaruh (percaya) dari isu-isu tersebut” (Budiono, wawancara pada 8 Juni 2022)

Pendekatan tarbiyah yang selama ini dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera memang memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan pendekatan partai lain, termasuk partai yang juga memiliki basis massa seperti PKB yang didominasi oleh kalangan Nahdlatul Ulama dan PAN yang mayoritas berasal dari Muhammadiyah. Perlu pembuktian lebih konkret dan massif guna menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera khususnya di Kabupaten Tegal merupakan partai yang terbuka dan menerima dari golongan mana pun. Agar meningkatkan kedekatan dengan masyarakat sekaligus sebagai jawaban atas stigma yang selama ini melekat pada Partai Keadilan Sejahtera.

Selain itu, hal yang cukup menarik adalah “politik moral” yang selama ini ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera, jarang sekali dijadikan berita utama (*headline*) baik itu di media cetak ataupun media elektronik. Frekuensi kemunculannya pada pemberitaan media *mainstream* sangat sedikit bila dibandingkan dengan partai lain. Pemberitaan hal positif baik itu dari segi program ataupun prestasi yang diraih oleh Partai Keadilan Sejahtera tidak cukup untuk menarik minat wartawan media. Hal ini terjadi karena secara otomatis akan menjadi *free*

campaign bagi Partai Keadilan Sejahtera apabila berita tersebut dimuat (Habibie, 2019). Fakta ini juga tidak ditolak oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal

“Memang dari kalangan internal kita baik itu tingkat daerah maupun tingkat pusat, belum ada yang berasal dari kalangan pemilik media, entah itu cetak, elektronik dan lain sebagainya, karena memang apabila disejajarkan dengan partai lain, program dan prestasi PKS cukup banyak dan beragam. Sehingga kita hanya melakukan publikasi lewat media internal partai baik itu *facebook*, *instagram*, maupun *website* partai” (Wawancara dengan Budianto, 8 Juni 2022)

Berita-berita yang bersifat menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera tidak akan terlalu mendapatkan *highlight* dari media. Sebaliknya, para awak media akan lebih tertarik apabila ada suatu tindakan kurang baik ataupun melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat maupun anggota dari Partai Keadilan Sejahtera, sekalipun data dan fakta yang diberitakan masih belum bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Berita yang semacam ini tentu akan *booming* dan akan dicari orang banyak karena selama ini Partai Keadilan Sejahtera melakukan agenda politiknya dengan mengedepankan partai yang bersih dari korupsi (Habibi, 2019).

2. Budaya Politik Pragmatis

Selain isu-isu negatif, sikap pragmatisme yang ada di masyarakat juga cukup menjadi hambatan Partai Keadilan Sejahtera untuk mengembangkan *Party-ID* di Kabupaten Tegal. Menilik pada pemahaman secara teoritis, sebuah budaya tercipta dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus. Demikian pula yang terjadi pada dunia politik karena terdapat keinginan yang cepat dan instan untuk mewujudkan tujuan dan ambisi politiknya, khususnya dalam

kancah politik elektoral yang melibatkan banyak aktor-aktor politik yang memiliki tujuannya masing-masing. Kebiasaan tersebut bermuara pada budaya politik pragmatis ataupun instan yang sejatinya mereduksi kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Budaya tersebut saat ini sudah meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya diakibatkan oleh sikap masyarakat cenderung melakukan hal-hal yang bersifat praktis. Masyarakat selalu mengedepankan nilai kepraktisan dalam melakukan aktifitasnya. Sesuatu yang dapat diperoleh dengan praktis dan instan akan dilakukan oleh masyarakat karena dianggap cukup mudah dan tidak mempersulit masyarakat apabila membutuhkan sesuatu. Sehingga hal ini mempengaruhi pula terhadap budaya politik pragmatis di masyarakat di Kabupaten Tegal karena masih ditemukan beberapa kasus *money politic* yang memanfaatkan sikap pragmatis masyarakat khususnya dalam pemilu.

Mendiskusikan budaya politik yang kian mengarah kepada pragmatisme merupakan hal yang menarik jika dikaitkan dengan konteks keadaan aktual di masyarakat. Munculnya kecenderungan masyarakat untuk bersikap pragmatis dalam berpolitik menjadi penanda bahwa realita politik bukan hanya sekedar tentang meraih dan mempertahankan kekuasaan, namun bagaimana mengatasi pragmatisme politik yang saat ini sudah membudaya di masyarakat (Sumartono, 2018).

Faktanya memang masih banyak masyarakat yang terjebak dalam pragmatisme politik. Hal ini diakui oleh Sekretaris DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal.

“Di Kabupaten Tegal sendiri masih banyak masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu, atau memilih peserta pemilu dari besaran uang atau barang pemberian dari peserta pemilu. Hal ini tentu menjadi hambatan dari kita yang menggunakan pendekatan melalui program yang bersifat *kontinyu*” (Ahsinudin, Wawancara pada 8 Juni 2022)

Persoalan pragmatisme memang selalu menggerus nilai-nilai demokrasi. Strategi *money politic* yang seringkali dilakukan baik dari partai politik ataupun perseorangan calon secara massif, menciptakan kebiasaan yang amat buruk bagi masyarakat dan tentu bagi pelaku politik uang itu sendiri. Imbas dari maraknya politik uang bagi masyarakat adalah nantinya masyarakat akan terbiasa menunggu peserta pemilu untuk memberikan uang, baru kemudian memberikan hak suaranya ke tempat pemungutan suara. Sedangkan bagi peserta pemilu yang melakukan *money politic* tentunya dampak negatif yang ditimbulkan adalah tingginya biaya politik guna memperoleh kekuasaan baik itu di tingkat legislatif dan eksekutif.

“*Political cost* yang tinggi pada akhirnya akan memperbesar peluang praktik korupsi itu sendiri, karena para pelaku politik uang memerlukan uang dengan jumlah yang banyak untuk mengembalikan modal yang telar dikeluarkan. Padahal jika menilik gaji dan tunjangan selama masa jabatan, itu tidak akan seimbang” (Budianto, Wawancara pada 8 Juni 2022)

Selama pragmatisme dalam politik masih membudaya di masyarakat, tentu akan menghambat pengembangan identifikasi partai politik dan kedekatan psikologis antara masyarakat dengan partai politik akan semakin renggang.

Masyarakat menilai kontestasi Pilkada merupakan bagian dari sebuah proyek yang hanya menimbulkan keuntungan bagi

beberapa pihak serta mengabaikan kualitas dari proses dan hasil pilkada. Hal inilah yang berpengaruh pada sikap masyarakat saat ini yang sebagian besar cenderung materialistis dalam menyikapi pemilu.

Terjadinya pergeseran dalam perilaku pemilih yang materialistis tidak semata-mata karena persoalan pada sistem pemilihannya tetapi banyak faktor yang harus dibenahi terutama proses perbaikan kualitas pendidikan politik masyarakat yang merupakan akar dari permasalahan tersebut. Oleh sebab itu yang paling bertanggungjawab dalam hal tersebut adalah para pakar politik, lembaga-lembaga masyarakat yang berfokus pada polling pendapat, partai-partai politik, organisasi masyarakat dan pihak pemerintah. Mereka harus lebih intensif dalam menyosialisasikan tema “Berpolitik Yang Beretika” apakah dalam bentuk seminar, panel diskusi, simposium, dialog interaktif di TV, dan kegiatan-kegiatan lain yang disponsori oleh pemerintah, agar nantinya masyarakat punya bahan-bahan masukan yang nantinya dapat dijadikan referensi dalam berdiskusi di antara mereka dan bukan lagi didasari oleh rasa dendam dari perilaku pemimpin sebelumnya dan saat ini, jadi semuanya didasarkan atas pertimbangan yang ilmiah dan asas manfaat.

Memang, sikap pragmatis menyalahi semua aspek kehidupan termasuk politik. Meminjam pendapatnya Ahmad Tafsir, jika sikap pragmatisme dibiarkan justru akan membahayakan kemanusiaan, bahkan manusia itu sendiri. Selain itu perilaku politik yang senantiasa pragmatis demi mempertahankan kekuasaan, akan menyebabkan sebuah model demokrasi semu. Jika demokrasi itu semu, maka pastilah (amanah konstitusi tidak akan terealisasi dengan baik.

Akibatnya ketimpangan hidup dalam tataran masyarakat akan semakin lebar.

Jika demikian halnya, maka pada akhirnya sikap pragmatis yang diterapkan politikus akan merusak tatanan nilai dan norma. Islam tentu sangat melarang keras hal ini. Bagi Islam, politik tak hanya dipandang sebagai wadah untuk menunjukkan eksistensi. Namun, Islam menganggap kekuasaan politik sebagai amanah yang harus selalu dijunjung dan dijaga. Islam memang tidak memberi ajaran resmi mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Meskipun begitu, Islam mengatur asas-asas atau prinsip umum (Miftah, 2018)

3. Keterbatasan Sumber Daya

Seperti yang kita ketahui bersama, sumber daya merupakan ‘bahan bakar’ dalam menjalankan organisasi partai politik. Baik itu sumber daya manusia, ataupun sumber daya ekonominya guna menunjang operasional partai. Hal ini pula yang masih menjadi tantangan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal. Jumlah anggota memang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi belum mampu meningkatkan intensitas kegiatan partai yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Terlebih lagi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal bisa dikatakan ‘berdiri sendiri’ tanpa sokongan dari konglomerat ataupun elit-elit yang memiliki sumber daya melimpah

“Memang kita mengakui bahwa sumber daya PKS Kabupaten Tegal tidak sebanyak partai-partai lain yang terkadang bisa *jor-joran* dalam membuat kegiatan. Kita pun sebenarnya ingin membuat kegiatan bersama masyarakat dengan skala yang besar. Akan tetapi melihat situasi dan kondisi internal yang masih dalam proses perkembangan, hal itu belum bisa terwujud” (Budianto, Wawancara pada 8 Juni 2022)

Memang untuk saat ini, keadaan finansial suatu partai sangat berpengaruh terhadap eksistensi partai politik. Semakin kuat finansialnya maka akan berdampak pada tingginya frekuensi kegiatan politik yang ditujukan baik itu untuk anggota partai, maupun masyarakat. Meskipun hal ini seharusnya bukan pula menjadi alasan sebuah partai politik untuk tidak berkhidmat untuk masyarakat.

Memang sudah menjadi rahasia umum, apabila ingin terjun dalam kancah perpolitikan di Indonesia, tentu memerlukan beberapa modal yang jumlahnya tidak sedikit. Modal tersebut yakni kecerdasan, kredibilitas, bermoral, amanah, memiliki koneksi yang cukup luas, serta memiliki uang yang cukup banyak. Akan tetapi perputaran uang dalam politik sering kali memunculkan permasalahan tersendiri. Khususnya bagi masyarakat yang bisa dikatakan cukup baru dalam ranah politik praktis dan tidak memiliki sumber daya yang cukup guna menunjang aktivitas politiknya. Sering kali kurangnya sumberdaya khususnya yang bersifat material seperti uang, menghambat seseorang untuk terlibat langsung dalam politik praktis sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya pimpinan yang berkualitas. Keterlibatan langsung dalam dunia politik praktis jika tidak dibarengi dengan kepemilikan modal yang cukup nampaknya hanya akan membuat tujuan dan cita-cita politiknya semakin menjauh.

Sumber daya dan kekuasaanpun nampaknya akan sulit dipisahkan keterkaitannya satu sama lain. Sumber daya diperlukan untuk meraih dan menjalankan kekuasaan, dan kekuasaan digunakan sebagai instrumen yang cukup penting untuk mengumpulkan sumber daya. Sehingga dari sini terlihat bahwa hubungan antara partai politik dengan sumber daya khususnya uang menjadi tak terpisahkan. Tidak dapat

dipungkiri, partai politik sebagai organisasi legal yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan di berbagai tingkatan, membutuhkan uang agar guna mencapai tujuan politiknya.

Namun, sejatinya partai politik tidak cukup hanya mengandalkan dana untuk kepentingan kampanye, akan tetapi juga untuk menggerakkan dan mengoptimalkan agenda kepartaian pada saat waktu di antara dua pemilu. Dana yang diperlukan untuk aktivitas ini sejatinya cukup banyak, karena guna mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat, partai politik wajib untuk selalu menunjukkan eksistensinya dengan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan: mulai dari hal yang bersifat dasar seperti operasional kantor, kegiatan pendidikan politik, kaderisasi anggota dan agenda konsolidasi mulai dari kepengurusan tingkat pusat hingga level terbawah yakni pada tingkat desa / kelurahan, serta kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan masyarakat umum. Memang pada awalnya, dana politik didapatkan dari iuran anggota partai politik baik yang mencakup dana operasional partai maupun dana untuk kepentingan kampanye. Tingginya ikatan psikologis kader partai dengan partai politik memunculkan sikap sukarela pada kader partai politik, sehingga kader partai tanpa keberatan memberikan sumbangan kepada partai politik. Inilah sejatinya kondisi yang ideal apabila tingkat *party-identification* sudah cukup tinggi.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Seiring dengan mulai terkikisnya hubungan ideologis antara partai politik dengan masyarakat, karakter partai politik berbasis massa semakin pudar. Padahal, sumber daya materiil khususnya uang sangatlah dibutuhkan oleh partai politik guna menunjang berbagai aktivitasnya, terlebih secara kuantitas kebutuhan tersebut tidak berkurang dan terus bertambah. Semakin pesatnya

perkembangan teknologi komunikasi serta dibarengi dengan kebebasan berpolitik untuk mengakses kekuasaan, menyebabkan kompetisi untuk meraih dukungan dari masyarakat melalui pemilu menjadi semakin ketat.

Persaingan melalui teknologi komunikasi ini ditandai dengan semakin berkembangnya metode kampanye yang menggunakan media massa seperti surat kabar, radio, televisi, hingga media daring yang tentunya mengeluarkan biaya tidak sedikit.

Persaingan tersebut mengakibatkan upaya dalam meraih dan mempertahankan pengaruh partai politik di masyarakat memerlukan dana operasional dengan jumlah yang banyak. Begitu pula untuk menunjang kegiatan kampanye untuk memperebutkan dukungan rakyat melalui pemilu, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apabila iuran anggota tidak mampu lagi untuk menopang operasional, partai politik mau tidak mau harus bekerja sama dengan kalangan yang memiliki sumber daya memadai, baik itu perseorangan, kelompok maupun lembaga, terlebih badan usaha untuk mendapatkan dana besar. Namun, hal ini nantinya akan berdampak kurang baik bagi partai politik, karena partai politik akan menghadapi dilema, yakni di satu sisi untuk merebut suara rakyat dan mempertahankan kepercayaan partai politik membutuhkan dana besar, namun di sisi lain dana sumbangan yang cukup besar mengakibatkan partai politik bergantung kepada para donatur tersebut, sehingga bukan tidak mungkin partai politik akan dijadikan wadah untuk melancarkan kepentingan dari para penyumbang.

Hal ini berarti bahwa bagi mereka yang ingin terjun dalam dunia politik mereka harus mempunyai uang yang cukup. Sebab, uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam kancah politik. Tidak bisa dipungkiri uang

memegang peranan penting dalam proses-proses politik. Tokoh politik yang sebelumnya kurang populer dan tidak memiliki kapasitas mampu secara mudah meraih dan mempertahankan kekuasaan yang diinginkan oleh banyak orang dengan memanfaatkan hal-hal yang bersifat materiil seperti uang karena dalam kancah politik, uang meenjadi salah satu faktor sangat penting dalam setiap proses politiknya.

Uang mampu memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi terciptanya keseimbangan demokrasi. Namun di sisi lain, uang juga mampu menjadi malapetaka ketika tidak mampu dimanfaatkan secara baik dan tidak berdasarkan pada aturan yang legal serta cenderung digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan yang bersifat ilegal. Uang seringkali dijadikan oleh politisi sebagai alat untuk membeli suara (*vote buying*) ataupun sebagai instrumen untuk melakukan jual beli jabatan guna memenuhi ambisi politik sesaat. Realita di Indonesia menunjukkan bagi mereka yang memiliki materi dalam jumlah yang banyak, sering kali memilih uang untuk dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki material yang cukup, maka akan menghalalkan berbagai macam cara guna mendapatkan uang tersebut. Dari beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa sejatiya tidak selamanya uang memberikan dampak positif. Justru dampak perputaran uang dalam kancah politik menimbulkan sebuah risiko yang sangat rawan.

C. Solusi Dalam Mengembangkan *Party-Identification*

Dalam menghadapi berbagai tantangan guna meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, tentunya Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal memiliki beberapa cara agar tetap berkontribusi kepada masyarakat, yakni :

1. Pembinaan Anggota Secara Berkelanjutan

Problematika yang dihadapi saat menjalankan program guna mengembangkan *Party-ID* tentunya memerlukan kontribusi dari setiap anggota Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera senantiasa melakukan pembinaan secara terus menerus agar terbentuk soliditas dan solidaritas yang tinggi dari para anggota partai. Dengan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, anggota partai akan diberikan materi pengenalan visi dan misi partai sehingga dapat memiliki mengetahui secara jelas dan rinci arah dan tujuan dari partai ini. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pada tahap awal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik kader muda PKS sehingga memiliki karakter yang jujur dan demokratis dan siap berjuang untuk rakyat, di samping itu tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan konsolidasi internal agar Partai Keadilan Sejahtera mampu bergerak cepat, keras, dan tuntas.

Membentuk kader yang mumpuni menjadi salah satu fokus utama pembinaan anggota Partai Keadilan Sejahtera melalui bidang kaderisasi guna terus berusaha meningkatkan jumlah kader partai serta meningkatkan kualitas pemahaman politik. Dengan dilakukannya pembinaan kader yang rutin, maka kader PKS dapat meningkatkan integritas dan kapasitas kader. Agar terbentuknya anggota partai yang solid dan militan terhadap partai, maka para anggota dibina dengan materi yang linear dengan ideologi partai.

Selanjutnya, anggota juga akan mendapatkan materi pembinaan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, sistem politik, dan kepribadian pemimpin eksekutif. Materi sistem pemerintahan dan sistem politik ini sesuai dengan sistem politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia dan diselaraskan dengan visi dan misi partai.

Dari materi yang dibina dapat terlihat anggota potensial yang akan dijadikan sebagai calon pemimpin dari internal partai. Calon

pemimpin dari internal yang terpilih harus merupakan anggota yang mempunyai kualitas. Pembinaan anggota yang dilaksanakan secara berkesinambungan ini membentuk karakter dari masing-masing anggota sehingga harapannya mampu berkontribusi dan berkhidmat untuk rakyat.

Sehingga, pembinaan anggota ini sangat berguna khususnya untuk kebutuhan kader-kader partai yang siap menjadi aktivis partai, baik sebagai pengurus, calon-calon pejabat publik atau pun sebagai pekerja partai dalam hubungan kerja-kerja partai terhadap konstituen maupun dengan publik luas. Untuk itu proses pembinaan ini selain mencakup pembentukan karakter, sikap dan komitmen untuk menegakkan kebebasan dalam wadah demokrasi. Selain itu, pembinaan berupa kaderisasi juga didesain untuk membekali para anggota dengan berbagai keterampilan. Seperti yang dilakukan dalam pembinaan anggota dewasa ini telah melakukan pembentukan kepribadian pemimpin dalam sistem pemerintahan dan sistem politik yang ada di Indonesia.

Gambar 13 Kegiatan Pembinaan Rutin di Kantor DPD PKS Kab. Tegal



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Para anggota telah dibekali dengan berbagai macam materi pembinaan, tentu sudah mengalami penguatan pemahaman serta karakter sehingga mampu untuk menghadapi berbagai problematika

yang ada di masyarakat. Terlebih problematika yang dihadapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan mengingat kebanyakan permasalahan muncul dari kalangan eksternal.

“Salah satu upaya untuk menghadapi problematika itu melalui penguatan secara internal, agar nantinya para anggota mampu menghadapi setiap permasalahan dengan bijak. Selain itu juga kita selalu mengokohkan solidaritas baik itu pengurus ataupun anggota mengingat sumber daya Partai Keadilan Sejahtera yang cukup terbatas sehingga memerlukan kolektifitas dari semua anggota Partai” (Budianto, wawancara pada 8 Juni 2022).

Pembinaan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera pun dirasakan langsung dampaknya khususnya bagi internal kader. Para kader merasa diayomi dengan kehadiran Partai yang melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan sinyal yang positif dan patut dipertahankan secara jangka panjang, bukan hanya dilakukan menjelang pemilu saja.

“Saya pribadi merasa cukup nyaman menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera dengan segala program yang ada. Terlebih pembinaan yang dilakukan bersifat kontinyu, bukan temporal saja. Pembinaan ini sangat penting guna merawat konstituen agar tetap solid dalam mendukung setiap keputusan partai yang bersifat positif” (Munsyifah, wawancara pada 2 Oktober 2022)

Dengan adanya pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Partai Keadilan Sejahtera akan memiliki anggota yang militan dan solid serta aktif berkontribusi di masyarakat sehingga akan membangun kedekatan psikologis dan meningkatkan *party-identification*.

2. Penegasan Sikap sebagai Partai Terbuka

Dalam menyikapi berbagai hambatan dalam mengembangkan *party-identification*, salah satu strategi yang cukup ampuh adalah mengubah sikap partai dari tertutup (eksklusif) menjadi terbuka (inklusif). Eksklusifitas partai selama ini dianggap sebagai 'sekat' antara partai politik dengan masyarakat sehingga akan muncul berbagai macam isu, terlebih yang bersifat negatif.

Jika ditilik perspektif pragmatisme politik, strategi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengubah 'baju' partainya memang sulit dilepaskan dari target-target politik terutama terkait yang berkaitan dengan elektabilitas, meskipun tujuan utamanya adalah tetap mempertahankan kedekatan dengan konstituen.

Maka tidak mengherankan jika kemudian berbagai terobosan dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk mewujudkan target tersebut diantaranya adalah dengan menjadikan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai terbuka sebagai pesan utama politiknya. Dengan strategi ini, diharapkan upaya Partai Keadilan Sejahtera menjadi sebuah partai terbuka bisa menjadi strategi yang cukup ampuh agar bisa diterima masyarakat Indonesia pada umumnya, tanpa tersekat oleh batas-batas primordial suku, agama, ras dan antar golongan.

Hal ini paling tidak terbukti ketika Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 1999, saat itu masih bernama Partai Keadilan (PK) hanya memperoleh 1,6% atau 1,4 juta suara nasional. Hal ini tidak lepas dari penggunaan simbol-simbol kelompok maupun pesan-pesan komunikasi politiknya yang relatif terkesan "eksklusif" di mata umumnya masyarakat Indonesia. Akan tetapi kemudian pada Pemilu 2004, peraihan suara Partai Keadilan Sejahtera (transformasi dari Partai Keadilan) melonjak menjadi 7,3% atau 8,3 juta suara nasional dan Pemilu 2009 meraih 7,8% atau 8,2 juta suara nasional.

Kenaikan suara PKS ini tidak lepas dari strategi politik yang ditempuh dengan menampilkan hal-hal yang lebih bersifat universal

serta mulai meninggalkan pesan-pesan politik yang dinilai terlalu sempit dan terkhusus seperti tema-tema bernuansa agama (Islam), namun melainkan pesan-pesan politik bersifat umum yang relatif terbuka bagi publik luas. Dalam konteks ini, Partai Keadilan Sejahtera mencoba menggunakan ide-ide umum yang berlaku di masyarakat luas sebagai pesan politiknya agar eksistensinya baik sebagai sebuah komprador politik sekaligus sebagai sebuah komunitas Islam agar lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ide-ide umum yang dimaksud adalah fakta sosiologis kemajemukan bangsa Indonesia yang terwadahi melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar-pilar kebangunan bangsa Indonesia.

Termasuk di sini adalah pengasosiasian ide-ide umum bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah bagian dari Islam moderat mengingat mayoritas muslim Indonesia memiliki pemahaman Islam yang moderat (pertengahan). Islam moderat sendiri dipandang sebagai model penafsiran secara teologis atas ajaran Islam yang dinilai lebih sesuai, lebih terbuka dan lebih bisa menerima fakta pluralitas dunia termasuk fakta kemajemukan bangsa Indonesia.

Sehingga pada akhirnya, Partai Keadilan Sejahtera mengambil konklusi bahwa menjadi sebuah partai terbuka dan menerima masyarakat dari berbagai golongan adalah pilihan tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat serta tentunya meraih dukungan suara semaksimal mungkin dari pemilih dalam kontestasi politik elektoral.

Dari uraian di atas, maka terlihat bahwa bahwa kebijakan Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai terbuka dari perspektif politik adalah untuk merangkul golongan masyarakat yang lebih luas lagi serta meningkatkan basis massa yang *outputnya* adalah kemenangan dalam pemilihan umum.

Maka pilihan menjadi partai terbuka adalah pilihan yang rasional bagi Partai Keadilan Sejahtera mengingat partai terbuka dianggap sebagai wadah terbaik yang bisa menampung pluralitas bangsa Indonesia melalui representasi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan maupun asosiasi sebagai bagian muslim moderat. Dengan pembaharuan ini diharapkan partai ini bisa lebih hadir dan diterima semua komponen anak bangsa meskipun secara ideologi Partai Keadilan Sejahtera tegas tetap menganut ideologi Islam (Wijaya, 2015).

Kemudian dalam menghadapi masyarakat yang cenderung pragmatis, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal tidak serta merta langsung melakukan perubahan secara kolosal. Melainkan secara perlahan-lahan dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu, yakni keluarga. Kebanyakan masyarakat yang sudah terbiasa pragmatis terutama ketika Pemilu cenderung cukup sulit untuk bersikap proporsional sehingga perlu dilakukan edukasi secara bertahap. Untuk mengubah perilaku politik masyarakat pun seharusnya juga dicontohkan terlebih dahulu oleh Partai Politik.

“Rasanya agak mustahil akan terciptanya situasi politik yang ideal apabila pragmatisme masih membudaya baik itu di masyarakat atau bahkan dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Kami di Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal selalu menghindari praktik politik semacam itu” (Budianto, wawancara pada 8 Juni 2022)

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal juga dengan tegas membuka diri kepada siapa pun masyarakat yang ingin bergabung, sesuai arahan dari Majelis Syura DPP Partai Keadilan Sejahtera. Diharapkan dengan kondisi yang semakin terbuka, partai ini akan semakin dikenal oleh masyarakat sekaligus menangkis berbagai macam isu negatif yang ditujukan kepada partai ini.

3. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Politik

Komunikasi dalam suatu organisasi selalu merupakan komunikasi satu arah maupun dua arah, demi kepentingan semua pihak. Dalam berkomunikasi kita menciptakan persamaan pengertian, ide, pemikiran, dan sikap tingkah laku kita terhadap orang lain. Komunikasi politik merupakan bagian dalam komunikasi di organisasi politik, kondisi ini dapat dilihat dari pola komunikasi dalam komunikasi politik yang juga terdapat dalam komunikasi organisasi, seperti komunikasi internal, dan eksternal, komunikasi vertikal, horizontal, komunikasi satu arah dan dua arah serta komunikasi verbal, dan nonverbal.

Dalam konteks politik, komunikasi merupakan penghubung segala informasi atau pesan baik verbal maupun nonverbal terhadap masyarakat luas dan internal partai politik itu sendiri. Komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera terbagi menjadi beberapa jenis, yakni retorika, agitasi politik, propaganda, kampanye politik, lobi politik dan lain sebagainya. Selain itu, lewat komunikasi politik pula Partai ini melakukan penyampaian AD/ART, visi, misi, semboyan partai, platform kebijakan partai, *khittah* perjuangan serta tujuan politik lainnya yang mendukung sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (Erwina dan Suwandi, 2017).

Komunikasi secara internal terjadi pada saat agenda kegiatan kepartaian yang dilaksanakan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal, seperti : Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah.

Gambar 14 Kegiatan Rakerda DPD PKS Kab. Tegal



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Komunikasi secara eksternal sebagian besar dilakukan dengan memanfaatkan media baik itu cetak maupun elektronik. Meskipun saat ini Partai Keadilan Sejahtera belum memiliki wadah yang besar untuk mempublikasikan agenda kepartaiannya secara masif, akan tetapi upaya komunikasi tetap dilakukan melalui media khususnya media sosial yang dimiliki oleh partai.

Selain itu ada pula komunikasi dengan eksternal yang diselenggarakan secara langsung, seperti kegiatan kemasyarakatan, silaturahmi dengan tokoh masyarakat, kegiatan pelestarian seni dan budaya daerah, serta kegiatan lainnya. Sehingga akan tercipta kedekatan dengan masyarakat sekaligus membangun citra partai yang inklusif sebagai wujud berkhidmat untuk rakyat.

Gambar 15 Kegiatan Festival Seni Budaya



Sumber : Arsip DPD PKS Kab. Tegal

Lewat komunikasi politiklah partai ini mencoba menghilangkan citra partai yang terkesan eksklusif sekaligus menghilangkan stigma negatif (*stereotype*) di masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas komunikasi politik juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan ikatan psikologis dengan masyarakat, serta terciptanya *baldatun toyyibatun warobbun ghofur* yang semuanya merupakan bagian dari tujuan dakwah secara umum dan tujuan politik secara khusus (Erwina dan Suwandi, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal terlihat cukup aktif dalam melakukan pengembangan *party-identification* karena mampu menjalankan fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dengan beberapa mengadakan audiensi dengan pihak terkait sehingga masyarakat merasa terwakili dengan hadirnya Partai ini. Selain itu, kemampuan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tegal yang sejauh ini sanggup mempertahankan citranya sebagai partai yang bebas korupsi juga merupakan hal yang positif ditengah maraknya kasus korupsi saat ini.

Partai Keadilan Sejahtera juga cukup aktif dalam melakukan berbagai macam kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi anggota partai serta masyarakat umum. Hal ini merupakan sesuatu yang positif terlebih kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya temporal ketika menjelang proses pemilihan umum. Antusiasme baik dari kalangan anggota maupun masyarakat umum pun cukup baik ketika mengikuti berbagai agenda partai. Kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut cukup mampu meningkatkan kedekatan masyarakat dengan Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini dibuktikan dari semakin bertambahnya masyarakat yang mendaftar menjadi anggota partai, meskipun jumlahnya belum terlalu signifikan. Akan tetapi hal ini sudah merupakan sinyal positif bagi partai politik untuk terus mengembangkan *Party-ID* guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Perkembangan keterbukaan Partai Keadilan Sejahtera juga merupakan solusi sekaligus jawaban terhadap isu-isu negatif yang selama ini beredar di masyarakat, dimana stigma radikal dan khilafah begitu melekat pada partai ini. Selain itu, bentuk partai yang mengarah pada inklusifitas diharapkan mampu untuk mengintegrasikan berbagai macam kepentingan dari masyarakat.

B. Saran

Dalam proses meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera agaknya perlu mengembangkan program-program yang lebih menjangkau kalangan muda dengan program yang lebih *fresh*, karena dalam beberapa tahun kedepan, pemilih akan didominasi oleh generasi millennial yang notabene lebih tertarik kepada hal-hal yang bersifat pembaharuan dan cenderung kurang tertarik kepada praktik politik yang sifatnya hanya mengutamakan elektoral semata.

Apabila hal ini dilakukan, harapannya semakin meningkatkan *party-ID* yang saat ini kian tergerus sehingga mampu menciptakan kualitas demokrasi yang lebih baik dan menghasilkan figur-figur politisi yang berkompeten dan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

C. Implikasi Teori *Party-Identification*

Temuan-temuan yang diperoleh di lapangan jika direfleksikan dengan teori identifikasi partai politik (*Party-ID*), maka dapat dipahami bahwa teori *party-id* masih sangat relevan untuk menggambarkan ikatan psikologis antara pemilih dengan partai politik serta kemampuan partai politik dalam merefleksikan dukungan dari pemilih tersebut sehingga konstituen dari Partai Keadilan Sejahtera merasa terwakili dengan berbagai program dan keputusan yang diambil oleh partai ini.

Daftar Pustaka

- Basrianto, Fadel. *Persoalan Party-ID di Indonesia*. 2018. <https://www.theindonesianinstitute.com/persoalan-party-id-di-indonesia>. (diakses pada 20 November 2021)
- Dwita Apriani, Kadek dkk. *Party-Id dan Tendensi Politik Uang di Provinsi Bali : Studi Kasus Pilkada Bali Tahun 2018*. Bali. 2020.
- Efriza. "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik". 2019.
- Fariad Hadinatha, Miftah. "Jejak Pragmatisme Dalam Politik Di Indonesia (Era 2009 – 2017)." *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam*. 2018.
- Habibi, Mohamad Ramadan. "Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Sorotan Media Di Indonesia". *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. 2019.
- Haryanto. *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*. Yogyakarta. 2014.
- <https://pkskabtegal.or.id>. (diakses pada 20 November 2021).
- Kaelola, Akbar. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Kamus Istilah Politik Kontemporer cetakan pertama. 2009.
- Metera, I Gde Made. "Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Santun Dan Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Sains dan Teknologi*. 2011.
- Mujani, Saeful dkk. *Voting Behavior In Indonesia Since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press. 2018.
- Nurussa'adah, Erfina. "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi". *Jurnal Kajian Komunikasi*. 2017.
- Parmudi, Mochamad dkk. "Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi." *Jurnal Studi Gender*, 2018.
- Reinjani, Dwi. 2018. https://kbr.id/nasional/01-2018/smrc__loyalitas_masyarakat_indonesia_terhadap_partai_terendah_di_dunia/94269.html. (diakses pada 20 November 2021)
- Romli, Lili. *Kerangka Penguatan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan, 2008.

- Salama, Nadiatus. *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Sandu Siyoto, & M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sedriyani, Sri Melan. “Partai Keadilan Sejahtera di Tengah Pusaran Tren Penurunan Anggota Partai: Bagaimana Cara Mereka Bertahan?” *Jurnal PolGov Vol 3 No1*. 2021.
- Sholikin, Ahmad. “Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019”. *Jurnal Transformative*. 2019.
- Sumartono. “Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis.” *Jurnal Lugas*. 2018.
- Supratmono. “Idealisme Dan Pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera : Implementasi Rekrutmen Terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015”. 2015.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Syamsuadi, Amir Dkk. Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 2020.
- Taqwa Sihidi, Iradhad dkk. *Relasi Politik Uang dan Party-Id di Indonesia*. Malang. 2019.
- Trianggoroarni, Erna Dkk. “Strategi Kampanye Partai Islam: Kasus Partai Keadilan Sejahtera Pada Pemilu 2019”. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. 2020.
- Wicaksono, Itok. “Peran Partai Politik Dalam Partisipasi Dan Aspirasi Politik Di Tingkat Pemerintahan Desa”. *Jurnal Politico*. 2017.
- Wijaya, Sri Herwindya Baskara. “Komunikasi Politik Partai Terbuka Ala PKS”. 2013.
- Yuniartin, Titin. “Framing Agama Dalam Politik Praktis : Studi Tentang Wacana Politik Keagamaan Partai Keadilan Sejahtera”. *Jurnal Studi Agama-Agama*. 2019.

